



**GERINDRA**  
Cermati RUU Keamanan Nasional

GEMA UTAMA >> 04



**PESAWAT MADE IN**  
Pasar Rebo

EKONOMI KERAKYATAN >> 12



**TANTRI KOTAK**  
Ingat Sumpah Pemuda

FIGUR >> 15

**G E M A**

TERBIT 16 HALAMAN/EDISI 20/TAHUN II/DESEMBER 2012

# INDONESIA RAYA

www.partaigerindra.or.id

## GELORA

### SURVEI

**SURVEI** adalah sebuah penelitian atau kegiatan mengumpulkan data untuk melihat situasi, kondisi atau persepsi masyarakat. Hasil survei dijadikan alat analisis untuk menentukan kebijakan atau intervensi strategi. Survei politik kini jadi semacam kewajiban dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), pemilukada dan lain-lain.

Metode survei merupakan adaptasi dari perangkat pemasaran (*marketing*) dan iklan dari dunia komersial. Melalui survei, bisa diketahui produk apa yang diinginkan konsumen. Produsen yang memperdagangkan produk tentu ingin barangnya laku dijual. Karena itu produsen butuh promosi melalui iklan yang menarik, mengenai target dan punya daya persuasi terhadap konsumen. Survei menjadi instrumen penting agar usaha *public relations* atau kampanye iklan, tak sia-sia.

Persepsi memang lekat dengan politik. Tak ada politik tanpa persepsi. Bahkan pertarungan politik seringkali merupakan perang persepsi (*perception war*). Persepsi ini tentu saja tak lepas dari pencitraan. Pencitraan adalah bagian dari rekayasa politik. Seperti halnya merek dagang, pencitraan dibentuk antara lain oleh kampanye citra. Tentu saja ada citra yang sudah terbentuk karena modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) atau modal agama (*religious capital*) yang dipupuk bertahun-tahun.

Survei politik belakangan ini menjadi sebuah peristiwa politik. Setiap pengumuman hasil survei diikuti pemberitaan masif di semua media baik televisi, koran maupun media *online*. *Talkshow*, diskusi dan debat digelar menanggapi hasil survei itu. Survei sudah menjadi bagian hidup politisi Indonesia.

Mulanya survei politik hanya menyoroti popularitas (*awareness*), kesukaan atau ketaksukaan (*favorability*) dan keterpilihan (*electability*) baik dari partai politik atau kandidat yang diusung. Dalam hal ini survei memfokuskan diri pada sembilan partai yang berada di DPR RI dan kandidat capres dari partai-partai yang sudah muncul. Survei opini publik memang dapat merekam pendapat rakyat luas tentang berbagai hal termasuk pilihan partai dan calon presiden.

Karena survei menjadi acuan, hasil jajak pendapat itu kini sangat penting keberadaannya. Ada yang menggunakannya untuk kepentingan internal, ada juga yang menjadikan survei sebagai alat politik. Untuk kepentingan terakhir itu, sang kandidat biasanya "membayar" survei agar hasilnya menguntungkan pemesan. Survei "pesanan" belakangan ini makin marak, sebuah bisnis politik baru.

Sebagai alat kampanye, hasil survei diharapkan dapat membawa efek bola salju atau efek *bandwagon* alias membentuk opini rakyat. Pada masyarakat yang belum sadar politik, efek ini bisa saja terjadi. Sementara pada masyarakat yang melek politik, justru bisa menjadi senjata makan tuan.

Survei "elit" yang dirilis baru-baru ini dapat menyesatkan karena tak mencerminkan pendapat rakyat, melainkan hanya segelintir elit. Walaupun pendapat elit tetap penting, namun yang paling utama dalam politik adalah sikap dan pendapat rakyat. Suara rakyat yang menentukan! ◀ **FADLI ZON**



## PATUK...!

Menteri BUMN Dahlan Iskan berkicau, telah terjadi kongkalikong antara BUMN dan Anggota DPR.

Baru tahu toh pak....

Akhirnya KPK menetapkan dua tersangka kasus Bank Century, tapi baru kelas teri.

Bolehlah sekedar menghibur....



FOTO REORO LUKSIAN KARIA SHAHA SABILIA

## PRABOWO SUBIANTO

# INDONESIA ADALAH SEBUAH PARADOKS

**KETUA** Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara besar asal pemerintahannya bersih dan pemimpin-pemimpin yang bersih. "Kuncinya ada pada pemerintahan yang bersih dan pemimpin-pemimpin yang bersih. Inilah perjuangan kita (Partai Gerindra)," katanya dalam tulisannya yang diunggah di *facebook* memperingati Hari Pahlawan 10 November lalu.

Prabowo menyebutkan, kondisi di Indonesia adalah sebuah paradoks. "Sejak delapan tahun lalu saya ungkapkan keadaan yang saya namakan 'paradoks Indonesia'. Bangsa yang kaya tetapi rakyatnya miskin," sebutnya. Kemiskinan itu, menurut Prabowo, tidak perlu terjadi apabila para pemimpin yang menguasai pemerintahan melakukan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, serta didasarkan atas akal sehat.

Dia kemudian memberi beberapa contoh tentang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Di antaranya, pengelolaan gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Eksplorasi gas dilakukan perusahaan asing dan dipatok dengan harga US\$ 3,35. Sedangkan gas yang sama dari lapangan

gas Bontang yang dikelola Pertamina bisa dijual dengan harga US\$20 per mmbtu.

"Kita merasa sedih, mengapa ada suatu pemerintahan yang tidak berani berpihak kepada bangsanya sendiri. Seandainya lapangan gas Tangguh dikuasai oleh PT Pertamina, perusahaan kita sendiri, betapa banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh putra dan putri Indonesia," urainya.

Contoh lain adalah kebocoran anggaran APBD yang mencapai 40 sampai 50%. Kalau rata-rata setiap APBD pemerintahan kabupaten dan kota sebesar Rp 1 triliun, berarti APBD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berkisar di angka Rp 500 triliun. Jika kebocoran APBD ditekan 20% saja, maka akan dihemat uang sebesar Rp 100 triliun. Bila kita bisa menekan kebocoran APBN sebesar 20% maka ada uang yang bisa dihemat Rp 300 triliun. "Dari menekan kebocoran anggaran kita bisa mendapat Rp 400 triliun setiap tahun," tulis mantan Danjen Kopassus itu.

Dalam hal pajak, saat ini penerimaan pajak sekitar Rp 873 triliun atau sekitar 11% dari PDB Indonesia sebesar Rp 7.427 triliun. Sebagai perbandingan, penerimaan pajak Singapura 22% dari

PDB, Thailand 16%, Zambia sebuah negara di Afrika, 16% dari PDB. "Berarti kinerja pemerintahan kita kalah dengan kinerja pemerintahan Zambia," katanya. Kalau penerimaan pajak sama (16% dari PDB) seperti Zambia akan diperoleh Rp 500 triliun. Ditambah dengan penghematan APBD dan APBN maka Indonesia bisa menambah Rp 900 triliun setiap tahun ke kas negara.

Uang sebesar itu bisa untuk menambah puluhan juta hektar lahan baru, eksplorasi minyak dan gas di bawah laut yang belum tersentuh, membangun sekolah, rumah sakit. "Kita bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hakim, jaksa, dan PNS tidak perlu korupsi. Angkatan bersenjata menjadi modern dan mampu menjaga kedaulatan dan wibawa negara," kata mantan Pangkostrad itu.

"Kita bisa menjadi negara besar. Kuncinya ada di pemerintahan yang bersih, pemimpin-pemimpin yang bersih. Saya ingatkan kembali, kalau orang-orang baik diam, kita akan selalu ditindas oleh orang yang tidak baik. Kalau kita tidak mau terlibat di politik, berarti membiarkan elite oligarki yang selalu berbohong, yang bertutur kata manis namun hatinya menipu rakyat," tutupnya. ◀ **BUDI SUCAHYO**

**Peduli Partai Gerindra**

Kenapa sampai saat ini pengurus Gerindra di daerah Minahasa Selatan nggak jelas. Juga sepertinya tidak ada kegiatan sosial kemasyarakatannya. Sangat kita sayangkan kalau partai yang lagi naik daun kemudian berantakan.

Saya sendiri adalah pengurus PAC di salah satu Kecamatan di Minahasa Selatan dan untuk itu saya peduli dengan masa depan partai ini.

Terima kasih,  
**HARLEN SAROINSONG**  
Minahasa Selatan,  
Sulawesi Utara

**Gerindra Jadi Penggembira di Pilgub Jabar**

Saya seorang simpatisan Partai Gerindra di Bandung. Saat ini saya merasa miris dengan pengurus Partai Gerindra di sini. Jawa Barat termasuk provinsi besar di Indonesia dan sudah patut kalau keberadaan Gerindra di sini juga harus diperhitungkan, baik dari internal partai maupun dari luar partai.

Seperti yang kita tahu bahwa Jabar sedang melakukan Pilkada Gubernur dan seperti yang kita ketahui bahwa nama Partai Gerindra baru masuk di hari terakhir pendaftaran peserta Pilgub Jabar dengan ikut pada pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana yang telah diusung Demokrat, PAN dan PKB.

Jadi hanya seperti ini kemampuan pengurus Partai Gerindra sehingga partai kita hanya sebagai "penggembira" saja di Pilgub Jabar? Ini adalah kenyataan pahit bagi Gerindra, di satu sisi PDI Perjuangan yang merupakan tandem Gerindra sejak lama sudah tidak mau lagi berkoalisi, dan di sisi lain partai lainpun atau kandidat lainpun tidak ada yang melirik Gerindra.

Ini pelajaran yang sangat berharga bagi Gerindra karena di provinsi yang besar kita tak bisa menentukan, hanya bisa mendompleng pada kandidat yang sudah diplot partai lain. Bagaimana Partai Gerindra akan menjalankan ekonomi kerakyatan? Bagaimana partai ini jadi besar, kalau

pengurus mempunyai kemampuan ala kadarnya? Terima kasih, semoga bermanfaat.

**SANDY SALIM**  
Bandung, Jawa Barat

**AD/ART Partai**

Kami dari DPC Lampung Tengah mau menanyakan apakah AD/ART yang baru hasil KLB sudah ada? Dan berapa jumlah pengurus DPC hasil perubahan. Terima kasih.

**SILVA FEBRIARIANTO**  
Lampung Tengah,  
Lampung

Untuk kepengurusan DPC minimal 25 orang dengan kuota 30% adalah perempuan.

**Saran untuk Gerindra**

Mohon perhatian Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra:

1. Pergantian Pengurus DPC Gerindra Kab. Rote Ndao tanpa mekanisme partai dan secara sepihak oleh DPD dan DPP.

2. Tanda tangan Bapak sebagai Ketua Dewan Pembina yang berwenang menyetujui pergantian ketua dan pengurus DPC diduga tidak ditandatangani secara langsung oleh Bapak, tapi discan oleh DPP dan DPD NTT.

3. DPC Gerindra Kab Rote Ndao – NTT memiliki tiga SK DPP, yaitu: A. SK DPP Nomor: 04-300/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tertanggal 8 April 2011 An. Arkhimes Molle; B. SK DPP No: 09-0147/Kpts/DPP-Gerindra/2012 a.n. Jacob Malelak tertanggal 5 September 2012 (Diktum Pecabutan Sk Tanggal 4 April 2011); C. SK DPP No: 09-0147/Kpts/DPP-Gerindra/2012 a.n. Jacob Malelak tertanggal 5 September 2012 (Diktum Pecabutan Sk Tanggal 8 April 2011).

4. SK pada poin 3b yang dipakai untuk verifikasi administrasi di KPU Pusat.

5. Tiba-tiba muncul lagi SK pada poin 3c setelah terjadinya gugatan pemalsuan di Polres.

6. Saat verifikasi faktual oleh KPUD Rote Ndao tanggal 3 Nopember 2012 di Sekretariat DPC Gerindra Rote Ndao, Ketua dan



ILUSTRASI SUSTHANTO

Sekretaris DPC yang baru tidak bisa membuktikan dan menunjukkan asli kedua SK tersebut dengan alasan SK masih ada di DPP karena saat Bapak Prabowo sedang sibuk dengan Pilkada DKI, tapi anehnya kopian bisa ada padahal Pak Prabowo belum sempat untuk tanda tangan.

7. Terhadap masalah ini apakah bisa Gerindra lolos verifikasi faktual di Rote Ndao oleh KPU.

8. Lebih mengherankan lagi SK a.n. Jacob Malelak dikeluarkan DPP tertanggal 5 September 2012. Kemudian DPD Gerindra NTT mengeluarkan mandat kepada Jacob Malelak dan Meksi B. Hida tertanggal 12 September 2012 untuk melaksanakan tugas DPC untuk verifikasi.

9. Terhadap rekayasa politik murahan seperti ini, saya mohon Bapak Ketua Dewan Pembina kiranya tidak mendiamkan kondisi ini yang hanya merusak citra partai.

10. Perubahan pengurus ini sudah tidak melalui mekanisme AD/ART tapi juga 90% pengurus diganti dengan orang-orang baru yang pernah menjadi anggota partai. Sementara semua peran pengurus asli Partai Gerindra yang *nota bene* kami merintis dan menghasilkan tiga kursi di dewan dalam Pemilu 2009, ditendang.

11. Aneh karena Ketua DPC yang baru a.n. Jacob Malelak tidak pernah ikuti kaderisasi di Hambalang dan sudah diusulkan untuk di PAW setelah 6x teguran DPC dan 3x teguran DPD karena tunggak 25% selama 27 bulan ditetapkan sebagai Ketua DPC.

12. Saya kritisi ini bukan untuk kembali dipercayakan sebagai ketua, tapi karena saya tidak ingin partai yang saya mulai dari nol menjadi 3 kursi hancur karena ulah pihak yang tidak peduli dengan kebesaran partai, yang penting kepentingannya yang bersifat sementara tercapai.

Terima kasih Tuhan Berkati.  
**ARKHIMES MOLLE**  
Nusa Tenggara Timur

**Tempat Mengadu**

Saya ingin bertanya, kemanakah kami harus mengadu dan mengeluh? Apa yang kami rasakan bertentangan dengan hati nurani. Kami ingin menyampaikan keluhan-keluhan kami di kabupaten tentang kepengurusan DPC yang tidak bisa melihat, memandang serta bersikap sebagai seorang Ketua DPC. Hanya mementingkan diri sendiri dan tidak transparannya seorang ketua dalam berbagai hal, baik itu berupa administrasi dan juga

keuangan partai. Terima kasih.

**ADI NUGROHO,**  
Kampar, Riau

**Perbedaan KTA**

Mohon izin bertanya, apa betul KTA online yang dilaksanakan oleh situs DPP Gerindra yang seminggu setelah proses pengiriman data diri anggota kemudian terbit KTA megah, yang lain dari terbitan DPC, itu di luar dari kepengurusan DPC Gerindra kota.

Maksud saya, kalau terjadi masalah dikemudian hari mengenai struktur pengurus DPC, maka DPC tidak mau bertanggungjawab atas pemegang KTA online DPP tersebut?

Mohon Informasi. Terima kasih.

**CHAREL MADO**  
Madiun Jatim, Kader  
Hambalang Angkatan X  
Graha 12.

Terima kasih Pak, pada dasarnya tidak ada masalah untuk penerbitan KTA Partai Gerindra yang dikeluarkan secara online ataupun pada pendaftaran di DPC-DPC. KTA yang dihasilkan tetap sama, karena sudah mempunyai sistem atau program khusus. Jadi data dari semua KTA akan masuk ke DPP dan tidak akan ada KTA ganda.

**Data Pengurus dan Alamat Kantor**

Perkenalkan, saya seorang wartawan di Jakarta. Saya juga tertarik dengan geliat politik Partai Gerindra, dan untuk itu saya juga menaruh harapan pada partai ini.

Hanya saja, saya ingin tahu siapa-siapa saja pengurus DPP Partai Gerindra dan alamat-alamat DPD dan DPC Partai Gerindra. Karena ini berhubungan dengan profesi saya sebagai wartawan dan keinginan pribadi saya untuk ikut mengembangkan Partai Gerindra.

Saya pernah lihat di website Partai Gerindra, tapi kalau saya perhatikan merupakan data lama. Menurut informasi yang saya dapat, sudah ada yang baru tapi belum dipublikasikan. Saya pikir ini agak aneh, mengingat 2014 hanya satu tahun lagi. Bagaimana pengurus tersebut akan berbuat untuk membesarkan Gerindra karena sampai sejauh ini mereka tidak tahu apakah masih jadi pengurus atau sudah diganti.

Saya sarankan supaya partai ini sudah harus bergerak, agar bisa jadi partai besar. Terima kasih

**AMIR DAULAY,**  
Jakarta

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA**

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160  
Telp: 62-21-789 2377, 780 1396  
Fax : 62-21-781 9712  
Email: info@partaigerindra.or.id

**GEMA  
INDONESIA RAYA**

**Pembina:** Prabowo Subianto **Pemimpin Umum:** Hashim Djojohadikusumo **Pemimpin Redaksi:** Fadli Zon **Wakil Pemimpin Redaksi:** M. Asrian Mirza **Dewan Redaksi:** Suhardi, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, **Redaktur Pelaksana:** Syahril Chilli **Redaktur:** Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yong W Pati (Artistik), Mustafa Kemal (foto) **Staf Redaksi:** Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika **Sekretaris Redaksi:** Wendra Wizar **Riset:** Hasby M Zamri, **Website:** Fadlun Ramadhany, Andi Nur Hamdi **Sirkulasi dan Distribusi:** Juanda Nurhakim **Umum:** Agung Budiarto, Ari Sobari **Penerbit:** Badan Komunikasi Partai Gerindra **Alamat Redaksi dan Usaha:** Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552

redaksi\_gir@partaigerindra.or.id atau redaksi\_gir@yahoo.com

Gerindra

@Gerindra

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.



# Kalau Presiden atau Wapres Bersalah

OLEH AMRAN NASUTION

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

SETELAH berputar-putar dengan bermacam dalih selama 2 tahun ini, akhirnya "rahasia" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbongkar. Dalam rapat KPK dengan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century di Gedung DPR Selasa, 20 November lalu, Ketua KPK Abraham Samad "buka kartu" dengan menyatakan KPK tak bisa memeriksa Wakil Presiden Boediono karena menurut konstitusi Wakil Presiden dan Presiden adalah warga negara "istimewa".

"Saya perlu jelaskan dalam teori konstitusi dan hukum konstitusi, pakar konstitusi menyatakan bahwa ada yang disebut sebagai warga negara istimewa yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kalau mereka melakukan pidana maka yang menyelidikinya adalah DPR. KPK tak punya kewenangan," kata Samad. "Jadi beda tak menyentuh dengan tak punya kewenangan secara hukum," ujarnya.

Sebagai hadiah "hiburan" Samad mengatakan, di DPR sudah ditemukan dua alat bukti, dan yang bertanggungjawab dalam skandal Bank Century ini – yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun – adalah dua bekas pejabat Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajriah. Kedua pejabat ini pada waktu peristiwa terjadi adalah staf Boediono, Gubernur BI pada waktu itu dan kini Wakil

Presiden. Artinya, mereka berdua bertindak atas sepengetahuan atau perintah Boediono.

Tentu saja pernyataan Abraham Samad (yang sesungguhnya jujur dan sesuai fakta) membuat kaget para anggota DPR dan wartawan. Maka sore harinya juru bicara KPK Johan Budi SP terpaksa tampil kepada pers untuk menjernihkan masalah itu, terutama soal warga negara istimewa itu. "Memang Presiden dan Wapres itu bukan warga negara biasa. Namun semua tetap sama di mata hukum (*equality before the law*)," ujar juru bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya di Jakarta Selatan.

Johan pun membantah ada perbedaan pandangan pihak-pihak di KPK atas masalah ini. "Secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelidikan, yang dianggap bertanggungjawab secara hukum Budi Mulya dan Siti Fajriah," katanya.

Johan menampik selama lebih 2 tahun menyelidiki kasus Bank Century, KPK tak menghasilkan kemajuan signifikan. Hal itu mengecewakan sejumlah pihak sebab KPK tak berhasil menjerat nama-nama yang selama ini santer disebut-sebut – seperti Wapres Boediono, bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Presiden SBY. "Kalau si X dan Y tak jadi tersangka bukan berarti KPK tak berhasil



Wapres Budiono (dan mungkin Presiden SBY) tampaknya terlibat skandal Bank Century tapi KPK picing mata. Mengapa?

menyelesaikan kasus Century," kata Johan.

Memang pada prinsipnya semua warga negara sama di depan hukum. Tapi kenyataannya berbeda. Kita tak pernah mengadili bekas Presiden pertama Soekarno dalam hubungan dengan Gerakan 30 September 1965, sekali pun ada Ketetapan MPRS tentang itu. Kita juga tak pernah mengadili bekas Presiden Soeharto dengan tuduhan menyelewengkan jabatannya, atau Presiden Abdurrahman Wahid untuk kasus korupsi Buloggate dan Bruneigate.



## Perkembangan Ekonomi Indonesia 2012 Anomali Pertumbuhan



MUHAMMAD TRI ANDIKA, S.IP, MA.

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS)

KOMUNITAS internasional secara umum memandang Indonesia sebagai salah satu Negara dengan performance ekonomi yang bagus. Setidaknya hal ini dilihat dari ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh diatas 6% ditengah kondisi perekonomian global yang tengah melemah. Ditambah pula dengan posisi Indonesia yang menjadi anggota kelompok 20 negara dengan produk domestik bruto terbesar (G-20).

Pemerintah berdalih bahwa dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 6,2% di triwulan ketiga 2012, walau sebenarnya angka ini tidak mencapai target 6,5%, telah memunculkan kecenderungan turunnya angka penduduk miskin. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dengan menurunnya angka penduduk miskin tersebut dapat dipandang sebagai sebuah "keberhasilan" telak pemerintah Indonesia di tahun 2012 ini? Atau ini hanya sekedar *superficial growth* yang menunjukkan anomaly pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Ada beberapa hal yang perlu kita simak secara seksama dalam memandang akrobat perekonomian Indonesia. Pertama yakni tentang *wealth distribution*, kedua tentang angka penduduk miskin, ketiga tentang *the rise of new rich*, dan terakhir yakni tentang ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia.

### Anomali pertumbuhan

PDB Indonesia memang mengalami peningkatan. Namun, BPS menyatakan bahwa struktur PDB Pengeluaran triwulan II-2012 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Rumah Tangga sebesar 53,5%. Di samping itu, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II-2012 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,6%, Pulau Kalimantan 9,5%, Pulau Sulawesi 4,8%, dan sisanya 4,6% di pulau-pulau lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki konsentrasi yang sangat besar, dan mengindikasikan pula bahwa *distribution of wealth* tidak tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terkait dengan menurunnya angka penduduk miskin yang ditampilkan BPS, saya tidak hendak berpendapat mengenai angka. Karena tentu untuk mendapatkan data yang spesifik tentang jumlah penduduk miskin, bukanlah pekerjaan satu atau dua hari. Namun, di sini bisa kita lihat bagaimana standar yang digunakan oleh BPS dalam mengategorisasikan penduduk miskin. Jika kita telaah secara seksama, standar yang digunakan BPS dalam kategorisasi kemiskinan cukup berbeda dengan standar yang di-

gunakan secara umum, setidaknya apa yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB menggunakan standar kemiskinan bagi mereka yang pengeluarannya kurang dari \$2 perhari atau sekitar Rp.18 ribu. Namun BPS menggunakan standar Rp.7.000 perhari. Perbedaan standar tersebut cukup membingungkan. Sehingga seringkali komunitas internasional tidak terlalu mengerti dengan pola penghitungan penduduk miskin di Indonesia.

Kondisi lain yang juga harus dibaca dari perfomen ekonomi-(politik) Indonesia saat ini ialah lahirnya kelompok penduduk sangat mapan (*new rich group*). Dari riset yang dilakukan oleh Standard Chartered, bahwa orang yang memiliki pendapatan Rp 240 hingga Rp 500 juta setahun, atau sekitar Rp 20 juta-Rp 40 juta per bulan, mencapai angka 4 juta penduduk, kurang lebih sekitar satu persen dari total penduduk Indonesia. Dengan angka ini, Indonesia berada di atas Korea, Taiwan, Malaysia, Hongkong dan Singapura.

Melihat paparan di atas, setidaknya ini membawa kita pada aspek yang berikutnya cukup penting untuk diulas, yakni seriusnya masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Indikator ketimpangan ini dapat dilihat dari tingginya *Gini Ratio* Indonesia. Pertum-

buhan boleh saja dibalang tinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasio ketimpangan juga sangat lebar. Level GINI Ratio Indonesia mengalami peningkatan dari 0.32 menjadi 0.41 di tahun 2011. Dari angka GINI Ratio ini kita dapat melihat bahwa semakin tinggi angkanya semakin tinggi pula tingkatan ketimpangan pendapatan.

Memang, ketimpangan pendapatan adalah masalah ekonomi di semua Negara. Sebagai contoh di Eropa, juga mengalami hal yang sama. Karena memang ada kecenderungan, dimana ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara tinggi, ketimpangan pendapatan juga semakin melebar. Namun, kalau di Eropa, ketimpangan pendapatan tinggi karena tingginya tingkat pengangguran. Namun kalau di Indonesia, tingginya ketimpangan ini disebabkan *lack of government intervention* untuk sektor-sektor dasar seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan pembangunan perumahan.

Melihat dimensi-dimensi tersebut, oleh karenanya perlu perhatian lebih dari pemerintah dan komitmen yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Sebab inilah penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang anomaly; yakni pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan. ◀

# Gerindra Cermati RUU Keamanan Nasional

Partai Gerindra mengambil sikap hati-hati yaitu belum menerima atau menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Gerindra masih mempelajari secara cermat RUU itu sambil melihat perkembangan di masyarakat.

OLEH BUDI SUCAHYO



FOTO-FOTO ISTIMEWA

**SEJUMLAH** Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggeruduk Fraksi Partai Gerindra. Ada apa? Rupanya LSM-LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan itu ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Koalisi itu mendorong Fraksi Partai Gerindra untuk menolak RUU Kamnas yang diajukan pemerintah.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan terdiri dari beberapa LSM yang bergerak dalam advokasi hak asasi manusia, seperti Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, dan beberapa LSM lainnya. Kedatangan sejumlah LSM itu diterima Ketua Fraksi Ahmad

mengajukan RUU yang sudah direvisi, di antaranya menghapus lima pasal (lihat *RUU Kamnas yang kontroversial*). Meski demikian, masih terdengar suara pro dan kontra di masyarakat.

Dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Gerindra, Direktur Program Imparsial Al Araf secara terbuka menyoroti beberapa pasal yang dianggap "berbahaya" jika RUU itu disahkan. Salah satunya mengenai definisi ancaman yang multitafsir dalam RUU tersebut. "Definisi ancaman yang belum jelas bisa digunakan untuk penyalahgunaan oleh pemerintah kepada pihak yang kritis kepada pemerintah," katanya.

Menurut Al Araf, RUU Kamnas masih belum layak dibahas oleh DPR. Sifat RUU Kamnas masih

mokrosi. Semua yang disampaikan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan bermuara pada permintaan agar Fraksi Partai Gerindra DPR RI menolak RUU itu.

Beberapa waktu sebelumnya, Oktober 2012, Partai Gerindra juga disambangi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoedin. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Fraksi Partai Gerindra itu dihadiri semua anggota fraksi. Pada kesempatan itu Wamenhan menjelaskan latar belakang RUU Kamnas. Pendekatan Wamenhan ini dapat dilihat sebagai harapan untuk mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Gerindra.

Partai Gerindra sendiri, seperti disebutkan Ahmad Muzani, belum mengambil sikap terhadap RUU Kamnas. Meskipun pihak pemerintah sudah memberikan penjelasan kepada Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas, namun Partai Gerindra menilai masih perlu pembahasan serius di tingkat Pansus. Menurut Ahmad Muzani, masih ada beberapa problem serius di RUU itu, misalnya menyangkut definisi keamanan.

"Saya sudah membaca drafnya berulang kali, problem yang serius memang ada di definisi keamanan itu. Karena definisinya didominasi oleh aktor-aktor negara. Definisi yang tidak jelas memang bisa dimanfaatkan rezim yang sedang berkuasa," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu. Dengan kata lain, RUU Kamnas membuka peluang dan rawan disalahgunakan oleh aparat yang diberi kewenangan.

Muzani menambahkan, RUU Kamnas belum mengatur secara jelas definisi dan kategorisasi keamanan. "Pada persoalan seperti apa tentara harus turun dan pada persoalan apa polisi harus turun. Ini yang masih belum jelas," katanya. Pergesekan antara Polri dan TNI rentan terjadi apabila RUU Kamnas ini nanti disahkan.

Meskipun Menteri Pertahanan sudah menjelaskan soal RUU di ha-

dapan Pansus pada Oktober 2012, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyebutkan RUU Kamnas harus dibicarakan lebih serius, mendalam dan komprehensif. "Jangan sampai ada area abu-abu yang bisa disalahartifikasikan. Itu berbahaya," ujar Muzani yang juga anggota Pansus RUU Kamnas. Partai Gerindra, lanjutnya, tidak gegabah menyetujui atau menolak RUU Kamnas meskipun pemerintah sudah menjelaskan tentang RUU tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon sependapat bahwa masalah isi atau meteri dari RUU Kamnas ini memang masih perlu didiskusikan lagi. Tapi, terlepas dari itu, Fadli Zon berpendapat, Indonesia membutuhkan UU Kamnas itu. "Sebagai negara demokrasi, Indonesia memerlukan UU Kamnas," ujar Fadli Zon, "UU kamnas sangat dibutuhkan bilamana sewaktu-waktu negara berada dalam keadaan bahaya."

## Keamanan dalam arti luas

Tak jauh berbeda dengan anggota Fraksi Gerindra lainnya, anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat juga mengungkapkan, Partai Gerindra ingin lebih dulu mendengar motivasi pemerintah mengajukan RUU Kamnas. "Nanti kita bicarakan, apakah RUU itu bermanfaat atau tidak. Itu sikap kita," katanya kepada *Gema Indonesia Raya*.

Wamenhan Sjafrie Sjamsoedin dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Gerindra sebenarnya sudah menjelaskan mengapa pemerintah menganggap RUU Kamnas ini diperlukan. Waktu itu, Sjafrie mengatakan bahwa peran polisi tidak diturunkan dan peran tentara juga tidak mungkin ditambah. Begitu juga masalah kebebasan pers dan HAM tidak akan ada masalah. Tetapi, menurut Martin, pemerintah harus juga meluruskan persepsi-persepsi tentang RUU Kamnas yang berkembang di masyarakat.

"Keamanan yang dimaksud Sjafrie adalah keamanan dalam arti

luas. Bukan hanya keamanan yang menjadi tugas Polri," ujar Martin. Dia mencontohkan, negara Amerika Serikat ketika terjadi peristiwa 9 September atau 9/11 – peristiwa pengeboman dua menara kembar WTC. Saat itu, kondisi pasca pengeboman ditangani sebuah Dewan Keamanan Nasional AS. Dewan inilah yang memberi perintah langsung kepada Kedubes, Bandara, dan lain sebagainya. Bukan lagi ditangani polisi, marinir, atau tentara, karena sudah menyangkut keamanan nasional.

Martin memberi contoh bila terjadi suatu epidemi atau virus (senjata biologis) yang mengancam negara. Persoalan itu bukan lagi ditangani Kementerian Kesehatan, polisi, tentara, melainkan Dewan Keamanan Nasional. "Jadi, keamanan dalam arti luas, bukan keamanan dalam arti sempit yang hanya menjadi tugas kepolisian. Persepsi ini harus dijelaskan ke masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi," jelasnya.

Mengenai kekhawatiran RUU Kamnas akan mengembalikan ke suasana represif seperti pada masa Orde Baru, Martin mengesampingkan hal itu. "Kalau dilihat dari RUU-nya sebenarnya tidak ada," ujarnya. Karena itu, harus ada rambu-rambu untuk mengawal RUU itu. Ia menyebut tiga rambu, yaitu: RUU itu tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945; RUU itu tidak boleh mengerdikan peran kepolisian; dan RUU itu tidak boleh membawa TNI ke jalur (ranah) politik. "Kalau tiga rambu itu sudah kita pegang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Karena itu, Martin menilai, RUU Kamnas itu perlu dibicarakan dan didiskusikan. "Kita jangan serta merta apriori. Kalau memang ada pasal-pasal yang tidak sesuai, harus ditolak. Kalau kita menganggap RUU Kamnas waktunya (momentumnya) belum pas, kita katakan belum pas. Tetapi harus didiskusikan," katanya. ◀



Muzani dihadiri seluruh anggota fraksi di Ruang Rapat Lantai 17, Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR/DPD, awal November 2012.

Draf RUU Kamnas sebenarnya sudah diajukan pemerintah sejak 2005, namun DPR menolak membahasnya dan mengembalikannya kepada pemerintah untuk diperbaiki. Pada Mei 2011, pemerintah kembali mengajukan RUU itu dan DPR lagi-lagi masih meminta perbaikan. Baru pada 2012 ini, pemerintah

prematurnya dan menyalahi banyak aturan, dan isinya rawan. "Secara substansial RUU Kamnas masih terlalu prematur untuk dibahas oleh parlemen. Bahkan RUU Kamnas memuat pasal-pasal bermasalah yang dapat mengganggu kehidupan politik demokrasi kita. Ada sekitar 40 pasal bermasalah dalam RUU Kamnas," paparnya.

Beberapa perwakilan LSM lainnya juga berpendapat, banyak pasal dalam RUU itu yang mengancam hak asasi manusia (HAM) dan de-



FOTO-FOTO ISTIMEWA

# RUU KEAMANAN NASIONAL Masih Kontroversi, Meski Telah Diperbaiki

RUU Keamanan Nasional masih menuai kontroversi. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan RUU Kamnas ini akan mengulang trauma di masa Orde Baru.

OLEH BUDI SUCAHYO/  
 IMANFIRDAUS

**RANCANGAN** Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional bukanlah RUU yang baru dibuat. RUU ini sudah ada sejak lama. Tahun 2005, draf RUU Kamnas ini sudah diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada waktu itu, RUU itu masih bernama RUU Pertahanan dan Keamanan Negara atau Hankamneg. Kemunculan RUU Hankamneg sudah mengundang kontroversi. Banyak suara pro dan kontra terhadap RUU Hankamneg. Tidak sedikit pula yang menentang RUU tersebut.

RUU Hankamneg tidak berlanjut ke tingkat pembahasan. DPR periode 2004 – 2009 akhirnya menolak melakukan pembahasan karena dianggap punya potensi untuk melanggar HAM, dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Setelah RUU itu dikembalikan oleh DPR, pemerintah—dalam hal ini Kementerian Pertahanan—mengambil langkah *cooling down* sambil merevisi pasal-pasal yang kontroversial. Dua tahun lamanya RUU itu tidak terdengar kabar beritanya.

Pada Mei 2011, pemerintah mengajukan kembali RUU yang kemudian menjadi RUU Keamanan Nasional (Kamnas) ke DPR.

Pembicaraan tentang RUU Kamnas kembali menghangat. Sesuai dengan agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU Kamnas akan dibahas pada masa persidangan 2012. Bahkan, dalam Prolegnas, RUU Kamnas menjadi prioritas utama yang harus dibahas antara pemerintah dan DPR.

Namun, lagi-lagi, DPR mengembalikan RUU itu ke pemerintah. Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas yang merupakan gabungan Komisi I dan Komisi III DPR, setelah mempelajari RUU itu, meminta draf RUU itu diperbaiki kembali.

Kini, pemerintah kembali mengajukan draft RUU Kamnas ke DPR dengan sejumlah perbaikan. Menurut pemerintah—Kementerian Pertahanan—pemerintah telah melakukan harmonisasi RUU Kamnas dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Kepolisian RI. Hasil harmonisasi itu berupa penyempurnaan RUU Kamnas. Semula, draf RUU berisi 60 pasal, kini setelah dilakukan harmonisasi menjadi 55 pasal (lima pasal dihapus).

Draf RUU Kamnas itu terdiri atas Bab I (1 pasal) tentang Ketentuan Umum, Bab II (3 pasal) tentang Hakikat, Tujuan dan Fungsi Kamnas, Bab III (11 pasal) tentang Ruang Lingkup Kamnas, Bab IV (2 pasal) tentang Ancaman Khusus, Bab V (34 pasal) tentang Penyelenggaraan Kamnas, Bab VI (2 pasal) tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab VII (2 pasal) tentang Ketentuan Penutup.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat dengan Pansus RUU Kamnas, Selasa, 23 Oktober 2012, menjelaskan beberapa hal, yaitu RUU Kamnas tidak akan mendegradasi peran Polri, RUU Kamnas tidak akan mengu-

bah peran TNI, RUU Kamnas tidak akan mengurangi kebebasan pers, Dewan Keamanan Nasional (DKN) bukanlah lembaga seperti Kopkamtib atau Bakorstanas pada masa Orde Baru, dan tidak ada ruang dalam Kamnas ini mengembalikan seperti pada masa Orde Baru.

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, peran Polri sudah diatur dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. RUU Kamnas justru akan mempertegas peran Polri, baik secara organisasi, tugas, dan fungsinya. “Dengan demikian, tidak ada maksud untuk mereduksi peran Polri seperti dikhawatirkan sejumlah kalangan,” katanya dalam rapat itu.

Dia juga menegaskan bahwa DKN (Dewan Keamanan Nasional) bukanlah lembaga operasional seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) atau Badan Koordinasi Bantuan Pemertahanan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) pada masa Orde Baru. Sebaliknya, DKN melibatkan unsur masyarakat sehingga kebijakan dan strategi keamanan nasional ditetapkan melalui forum yang demokratis.

“DKN ini merupakan pengalihan fungsi dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). DKN bukan dewan operasional, tetapi dewan yang sifatnya hanya di tataran kebijakan dan strategi. Jadi, sifatnya nasional. Di situ masuk unsur masyarakat. Jadi apa yang dikhawatirkan?” tanyanya.

Pemerintah, menurut Purnomo, ingin RUU Kamnas ini tetap dibahas. Jika ada hal yang harus diperbaiki atau ada yang tidak disetujui, bisa dibicarakan serta disepakati lebih lanjut dalam pembahasan di DPR. “Dengan begitu pasal-pasal yang diajukan pemerintah dalam RUU Kamnas ini bukan harga mati,” ujarnya.



Korban demonstrasi yang brutal

## Polemik

Meski pemerintah telah mengajukan kembali RUU Kamnas dengan sejumlah perbaikan, banyak elemen masyarakat masih menolak RUU itu. Polemik tentang RUU Kamnas terus bergulir. Sikap yang diambil Pansus RUU Kamnas DPR RI sendiri adalah ingin mempelajari lebih mendalam RUU Kamnas yang diajukan pemerintah itu.

Namun, beberapa fraksi sejak awal telah menolak RUU tersebut lantaran berpotensi mengembalikan negara ke arah sistem militeristik dan mengancam kebebasan masyarakat sipil. Bahkan RUU tersebut juga berpotensi disalahgunakan demi kepentingan politik atau kepentingan penguasa. Sebab, dengan (berlandaskan) RUU Kamnas ini, aparaturnya bisa bertindak represif. Tentu saja, tindakan represif aparaturnya akan cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM).

Beberapa pasal karet RUU Kamnas yang dinilai mengancam dan bisa disalahgunakan oleh penguasa, antara lain: Pasal 54 (e) dan Pasal 22 jo Pasal 23 RUU Kamnas. Dalam pasal itu disebutkan Dewan Keamanan Nasional punya hak dan kuasa khusus menyadap, menang-

kap, memeriksa dan memaksa orang yang dianggap bisa mengganggu keamanan nasional. Ini cenderung bisa menjadi sebuah pelanggaran HAM.

Pasal 22 jo pasal 23 RUU Kamnas dengan tegas memberi peran luas kepada Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai penyelenggara Kamnas. Dari pasal itu ada kekhawatiran pemerintah menjadikan TNI dan BIN sebagai aparaturnya penegak hukum. Sebab, penjelasan pasal ini menyebutkan, kewenangan unsur keamanan nasional untuk melakukan hak menyadap, memeriksa, dan melakukan tindakan paksa. Dalam pelaksanaannya, pemberian kewenangan terhadap badan intelijen ini bisa berpotensi melanggar HAM dan bisa dimanfaatkan oleh penguasa yang berwenang mengendalikan badan intelijen untuk membungkam kekuatan lawan atau kelompok-kelompok kritis sebagaimana dipraktikkan pada era Orde Baru.

Selain itu, Pasal 17 (4) berpotensi membahayakan demokrasi

karena menyebutkan ancaman potensial dan non potensial diatur dengan keputusan presiden. Pasal yang mengatur posisi tunggal presiden dalam memutuskan masalah keamanan nasional dapat disalahgunakan. Dengan pasal ini, maka presiden memiliki kewenangan yang besar dalam persoalan keamanan nasional.

Kelanjutan RUU Kamnas berada di tangan fraksi-fraksi DPR RI. Di kalangan fraksi-fraksi yang ada di DPR juga terdapat pro dan kontra terkait RUU Kamnas itu. Sejauh ini penolakan terhadap RUU Kamnas datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura, sementara Fraksi Gerindra belum memastikan sikapnya.

Di pihak lain, enam fraksi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi – Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB agaknya juga belum satu kata apakah melanjutkan pembahasan RUU Kamnas ini atau tidak. “Menurut hemat saya, sebaiknya pemerintah menunda pembahasan RUU ini,” ujar Muhammad Nadjib, anggota Fraksi PAN yang juga anggota Pansus RUU Kamnas. Nasib RUU Kamnas ini memang masih tanda tanya. ◀

## GLADIAN II BALI

# Semangat Mencintai Tanah Air

Gladian II di Bali berlangsung dengan semangat kepahlawanan. Kegiatan untuk menggugah semangat perjuangan untuk mencintai tanah air. Ada saja kegiatannya?

OLEH IMAN FIRDAUS

SETELAH berhasil mengadakan acara peduli lingkungan bernama Gladian I di Gunung Kidul, Jogjakarta, setahun lalu, DPP Partai Gerindra kembali menggelar Gladian II di Bali. Acara bertema lingkungan ini, sengaja digagas oleh DPP Partai Gerindra Bidang Lingkungan Hidup untuk mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan.

"Kita para kader dituntut untuk lebih berkreasi dan berinovasi," kata Ketua I Bidang Perbaikan Lingkungan Hidup Waskita Rini. Acara yang berlangsung 9-11 November itu melibatkan pengurus dan struktur Partai Gerindra di Bali, yang dipimpin langsung oleh Ketuaannya Ida Bagus Putu Sukarta dan Ketua DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat Willigo Zainar.

Salah satu agenda yang paling menarik adalah Wisata Lingkungan Hidup yang melibatkan 100 peserta. Seluruh peserta diajak berjalan

menyusuri Desa Tenganan, Tirta Gangga, Tampak Siring, Kintamani, dan bermalam di Desa Penglipuran, Bangli. Selama di Desa Tenganan, para peserta melihat kearifan lokal yang ada di sana. Yang jelas, suasana desanya masih terasa 100%, karena Desa Tenganan pernah dua kali meraih penghargaan di bidang lingkungan hidup, Kalpataru.

Saat mengunjungi Desa Tenganan, hadir Ketua Umum Suhardi ditemani oleh Anak Agung Jelantik Sanjaya, anggota Komisi IV DPR RI – komisi yang membidangi pertanian dan kehutanan. Begitu pula Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, hadir di arena Gladian sebagai perwakilan Ketua Dewan Pembina.

Sementara Kesira (Kesehatan Indonesia Raya), sayap partai yang bergerak di bidang kesehatan ikut berpartisipasi dengan memberikan lima unit mobil *ambulance care*,



FOTO ISTIMEWA

yang diserahkan langsung oleh Ketua Kesira dokter Benjamin dan Wakil Ketua Grace.

Menurut Waskita Rini, acara ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, sehingga semangat perjuangan untuk mencintai tanah air, saatnya diwujudkan dalam bentuk mencintai

lingkungan. "Dengan semangat kepahlawanan kita lanjutkan perjuangan para pahlawan, kita hasilkan karya cipta yang bermanfaat bagi perbaikan lingkungan hidup," katanya.

Usai acara, panitia mengadakan lomba karya cipta ilmiah aplikatif lingkungan hidup bagi remaja.

Lomba ini sengaja diadakan untuk merangsang minat anak muda pada bidang karya ilmiah yang tampak mulai meredup. Rencananya, pemenang lomba karya ilmiah aplikatif lingkungan hidup ini akan diumumkan pada 2 Januari 2013 melalui *website* dan *facebook* Partai Gerindra. ◀

## KASUS BANK CENTURY

# Memasuki Babak Baru, Dua Tersangka Ditetapkan



FOTO ISTIMEWA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru penyidikan kasus dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun dengan menetapkan dua tersangka baru, yakni: mantan Deputi Bank Indonesia Siti Fadriah dan Budi Mulia. Namun, bukan dua orang bawahan itu yang menarik. Tapi dugaan keterlibatan bekas Gubernur BI yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Boe-

diono yang sebagian masyarakat nantikan. Benarkah Boediono terlibat dan akan dijadikan tersangka oleh KPK?

Namun, harapan publik mungkin akan sirna. Sebab, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, KPK tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Boediono terkait dugaan keterlibatan dalam kasus dana talangan Bank Centu-

ry. Sebab, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Boediono kini merupakan warga negara yang mendapat hak istimewa. Jika dia diduga melakukan pelanggaran berat, yang berhak melakukan penyelidikan adalah lembaga DPR, yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terkait hal ini kami serahkan kembali ke Bapak-bapak semua di

DPR," kata Abraham di hadapan Pansus Bank Century DPR baru-baru ini.

Bila KPK sudah menyerahkan kembali ke DPR maka proses politik kembali bergulir. Isu Hak Menyatakan Pendapat pun segera disuarakan oleh sebagian anggota. Hak konstitusional DPR memang kelanjutan dari hak interpeleksi dan hak angket. Namun di dalamnya mengandung bentuk "ancaman" kepada Presiden dan Wakil Presiden yang diduga sudah melakukan pelanggaran konstitusi atau pelanggaran pidana berat yang bisa berujung pada pemakzulan (*impeachment*).

Namun, tidak semua fraksi setuju atas usul hak menyatakan pendapat tersebut. Fraksi Partai Gerindra, meski setuju dengan proses hukum di KPK, namun menolak menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. "Terlalu prematur," kata anggota Komisi III Martin Hutabarat. Pasalnya, KPK belum menuntaskan seluruh pekerjaannya sehingga kesimpulan akhir harus tetap ditunggu. Gerindra tidak ingin buru-buru masuk dalam pusaran desakan fraksi lain, sebelum semuanya jelas dan mengikuti alur yang jelas.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, ada dua pilihan proses dalam kasus

Bank Century yang melibatkan Boediono. *Pertama*, mendahulukan proses konstitusional. *Kedua*, memakai proses pidana begitu Boediono meninggalkan jabatannya pada 2014.

Jimly menegaskan, secara pribadi Boediono bisa dituntut seandainya ada cukup bukti dalam kasus penyelamatan Bank Century. Tetapi, sebagai Wakil Presiden, dia tidak bisa dituntut. Karena itu, jika ingin memaksakan proses hukum sekarang, yang harus digunakan adalah proses *impeachment*.

Jadi, sebenarnya tindakan DPR melimpahkan kasus Century ke KPK tidak tepat. Jika ingin memaksakan *impeachment*, seharusnya Dewan menunjuk KPK sebagai jaksa *ad hoc* dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Hukuman yang akan dihadapi Boediono adalah pemberhentian sebagai Wakil Presiden.

Artinya, KPK yang akan menghukum Boediono. Bila dinyatakan bersalah maka Boediono berhenti sebagai wakil presiden. Bila tidak, maka tetap menjabat. Namun bila ingin tetap melanjutkan ke KPK, kata Jimly, tunggu sampai Boediono berhenti jadi wakil presiden. ◀

## PEMILUKADA JAWA BARAT Akhirnya Berlabuh ke Dede Yusuf



Dede Yusuf

FOTO ISTIMEWA

**PARTAI** Gerindra akhirnya memutuskan, memberi dukungan kepada pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Barat yang berlangsung awal 2013. Keputusan itu diambil pada detik terakhir menjelang pendaftaran ca-

lon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat pada Sabtu, 10 November 2012.

"Keputusannya tadi malam. Kami sudah mengambil keputusan terhadap calon gubernur Jabar yang akan kita dukung. Pak Prabowo akhirnya mengambil ke-

putusan untuk mendukung Dede Yusuf dan Lex Laksamana," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Sabtu, 10 November 2012. Keputusan itu diambil setelah menggelar rapat dengan pengurus DPD Gerindra Jabar dan DPP Gerindra sejak Jumat malam,

9 November 2012.

Dalam Pemilukada Jawa Barat, Partai Gerindra hanya memiliki delapan kursi, sedangkan untuk mengajukan cagub dan cawagub mensyaratkan 15 kursi di DPRD Jawa Barat, sehingga Partai Gerindra perlu berkoalisi dengan partai lain. Pada awalnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo ingin mengusung pegiat anti-korupsi Teten Masduki. Lewat *twitter* dan *facebook*, Prabowo memberi dukungan kepada Teten Masduki untuk maju dalam Pemilukada Jabar (lihat *Gema Indonesia Raya*, November 2012).

Namun, menjelang pendaftaran, PDI Perjuangan justru meminang Teten Masduki untuk mendampingi Rieke Dyah Pitaloka yang mengincar Jabar-1. PDI Perjuangan maju dengan mengusung cagub dan cawagub sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. PDI Perjuangan tak mengajak bicara Partai Gerindra terkait dengan pencalonan Teten. Prabowo pun akhirnya urung mendukung pasangan Rieke – Teten.

Jelang ditutupnya pendaftaran cagub dan cawagub Jabar, Partai Gerindra belum menentukan dukungan. Pada Kamis malam, 9 November 2012, lewat *facebook*, Prabowo memberi keterangan.

*Sahabat-sahabatku,*

*Tugas mulia sebuah partai politik dalam demokrasi, adalah mencari, membina, dan mengajukan calon-calon pemimpin yang terbaik untuk rakyat.*

*Seperti sahabat ketahui, dalam hal Pemilukada Jawa Barat yang akan datang tadinya kita melirik saudara Teten Masduki yang memiliki jejak rekam baik dalam melawan korupsi di negeri ini. Namun hari ini*

*kita mendengar, beliau dicalonkan oleh partai politik lain sebagai calon wakil gubernur.*

*Saya membaca aspirasi yang berkembang di sini, saudara tidak menghendaki beliau sebagai wakil gubernur. Saya sependapat dengan saudara.*

*Saya juga pernah melirik calon lain untuk memimpin provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah Profesor Nanat, Ketua Presidium ICMI, mantan Rektor UIN, seorang tokoh cendekiawan muslim yang bersih, jujur dan memiliki niat untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara.*

*Namun sayang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak dapat mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Jawa Barat karena Partai Gerindra hanya memiliki delapan kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk dapat mengusung calon sendiri, Partai Gerindra perlu memiliki 15 kursi di DPRD.*

*Malam ini, saya bersama ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat meminta saran dari seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Partai Gerindra di Jawa Barat, sebaiknya ke arah siapa dukungan kita?*

*Satu hal yang pasti, kita hanya akan mendukung calon yang memiliki jejak rekam bersih, dan memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi-walaupun mungkin dukungan tersebut dinilai kurang populer, dan/atau dukungan kita berikan bukan kepada kader partai kita sendiri.*

*Salam Indonesia Raya*

Akhirnya malam itu juga, Partai Gerindra mengambil keputusan mengalihkan dukungan kepada pasangan Dede Yusuf – Lex Laksamana. ◀ **BS**

## PEMILUKADA SULAWESI SELATAN Garuda-Na Siap Bertarung

Untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2013, Partai Gerindra mengusung pasangan Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi disingkat Garuda-Na. Bagaimana kans pasangan ini?

OLEH AGUSTAMAN

**HARI-HARI** belakangan ini kesibukan Andi Rudyanto Asapa bertambah. Selain masih menjabat Bupati Sinjai untuk periode kedua hingga 2013, kini Andi Rudyanto sebagai calon Gubernur Sulawesi juga sedang bersiap-siap menghadapi Pemilukada yang berlangsung 22 Januari 2013. Dalam pemilihan ini, Andi Rudyanto berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Andi Nawir Pasinringi, yang menyebut dirinya pasangan Garuda-Na.

Pasangan Garuda-Na ini dinyatakan lolos sebagai Cagub dan Cawagub oleh KPU Sulses pada 13 Oktober 2012 setelah duo Andi ini berhasil meraih dukungan 15,92% suara sah pemilu 2009 atau 597.987 suara. Keduanya didukung oleh gabungan partai, yaitu Partai Gerindra bersama 18 partai lain-

nya, antara lain: Partai Kedaulatan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Nahdatul Ummah Indonesia.

Jadi, dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel ini akan bertarung tiga pasangan calon, yaitu: petahana Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang; Ilham Arief Sirajuddin Kahar Muzakkar; dan pasangan Garuda-Na.

Meski menghadapi pesaing kuat, pasangan Garuda-Na optimistis akan bisa bersaing dan memenangkan Pemilukada Gubernur tersebut. Ia telah memiliki modal kuat, yaitu pengalaman menjabat Bupati Sinjai yang kini memasuki periode yang kedua. "Saya optimistis akan membalikkan fakta yang benar, saya



Andi Rudyanto Asapa – Andi Nawir Pasinringi

FOTO ISTIMEWA

dan Andi Nawir sebagai petarung sampai sekarang tak pernah kalah bertarung," tutur Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel ini.

Apalagi mendapat dukungan dari sejumlah partai, yakni Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Barisan Nasional, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah, Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Pemuda Indonesia, maka ia

yakin akan meraup suara dan menang.

Pasangan Garuda-Na yang bernomor urut tiga menawarkan program pendidikan gratis hingga tingkat SMA dan SMK, seperti yang diterapkan di Sinjai. "Dari hitung-hitungan kami, anggaran pendidikan gratis sampai SMA tidak mengganggu APBD. Contohnya di Sinjai kami bisa lakukan, kami juga yakin kalau di Sulsel bisa," ujar alumnus Fakultas Hukum Unhas yang ter-

inspirasi atas kemenangan Jokowi-Basuki di Pilgub DKI beberapa waktu lalu.

"Nomor urut tiga ini sama dengan nomor urut pasangan Jokowi dalam pelaksanaan Pemilukada Jakarta. Sehingga potensi kemenangan tersebut juga akan terulang di Sulsel," harap Andi Rudyanto optimistis. Hanya, ia mengharapkan agar semua calon menjaga sportivitas, termasuk siap kalah dan siap menang. ◀

# Gerindra Berharap Punya Cabang di Timor Leste

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Kamis (29/11), menerima kunjungan Ketua Fraksi CNRT Timor Leste Natalio Santos di Fadli Zon Library, Benhil, Jakarta. Kedua petinggi partai dari dua Negara bertetangga ini saling bertukar pikiran.

OLEH M. BUDIONO



FOTO MUSTAFA KEMAL

**BAGI** Timor Leste, Indonesia memiliki peran dan posisi yang sangat penting. Karena 80% impor untuk kebutuhan sehari-hari di negara tersebut berasal dari Indonesia. Mulai dari bahan pangan, pakaian hingga kebutuhan yang lain. Bahkan banyak insinyur asal Indonesia yang dipekerjakan di sana, mereka membantu pelaksanaan berbagai proyek pembangunan.

Karena itu, Timor Leste in-

gin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Melupakan kungkungan sejarah masa lalu dan menatap masa depan, dengan membina hubungan saling menguntungkan bagi kedua negara. Apalagi, sebagian masyarakat di kedua negara pernah hidup berdampingan pada masa sebelum terjadinya referendum, atau sebelum Timor Timur (sekarang Timor Leste) berpisah dari Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Natalino Santos, Ketua Fraksi Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) ketika melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di *Fadli Zon Library*, Jl. Limboto Benhil, Jakarta, Kamis (29/11). Dalam pertemuan itu Natalio didampingi oleh anggota CNRT Joaquin de Jesus Amaral dan Raul Lemos.

Menurut Natalino, kenangan

masyarakat Timor Leste terhadap Indonesia masih terjaga hingga kini. Bahkan, tidak sedikit rakyat Timor Leste yang masih merasa bersaudara dengan bangsa Indonesia. Terbukti dari cara penerimaan mereka terhadap para pemimpin Indonesia yang berkunjung ke sana.

"Waktu pak SBY datang ke Timor Leste, masyarakat menerimanya dengan baik dan meriah. Dan, yang lebih mengharukan adalah

saat kedatangan Bu Mega (mantan Presiden Megawati Soekarno). Ketika itu, dengan sukarela, masyarakat membentangkan bendera, merah putih, sejak keluar dari Bandara hingga tempat bu Mega menginap," kata Natalino.

Selaku tuan rumah, Fadli Zon sependapat dengan tamunya bahwa hubungan kedua negara patut ditingkatkan. Terlebih Timor Leste merupakan tetangga dan pernah berada dalam satu wilayah Negara Republik Indonesia. Seperti harapan Natalino, Fadli juga merasa bahwa kedua negara patut menjalin hubungan baru, tanpa mengusik sejarah masa lalu.

Ke depan Fadli berharap, komunikasi kedua negara lebih ditingkatkan lagi. Dan, Gerindra berharap bisa segera memiliki cabang di Timor Leste. Seperti juga keberadaan cabang Partai Gerindra di negara-negara tetangga lainnya.

Dalam kesempatan itu, Fadli Zon memperlihatkan sejumlah koleksi barang-barang kuno yang tersimpan di Fadli Zon Library, seperti: keris, piringan hitam, perangko, buku-buku kuno, kacamata sejumlah pimpinan Indonesia dimasa lalu, dan sebagainya. ◀

## Jangan Jadi Alat Politik



Dahlan Iskan

Masyarakat akan menilai keseriusan pejabat dari tindakan dan perilakunya. Bila kasus pemerasan tidak ditindaklanjuti, dan hanya dijadikan mainan politik, kepercayaan akan makin luntur.

OLEH IMAN FIRDAUS

**LAPORAN** Menteri Negara Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR tampaknya akan berakhir antiklimaks. Pasalnya, setelah BK membuka semua laporan yang disampaikan ternyata Dahlan tidak menyertakan data dan bukti yang sah, hanya kronologi kejadian yang diduga melibatkan beberapa nama anggota DPR. "Dahlan Iskan tidak mengalami sendiri, tidak mendengar dan tidak melihat. Hanya dengar cerita dari direksi BUMN," kata Ketua BK Prakosa saat menggelar jumpa pers, awal Oktober lalu. Meski demikian, BK tetap akan menelusuri dugaan pemerasan yang melibatkan sejumlah nama serta tiga direktur BUMN.

Dahlan Iskan sendiri yakin bahwa ada sejumlah nama yang meminta jatah kepada BUMN. "Saya tidak mengatakan pemerasan. Hanya minta jatah," katanya. Di hadapan pimpinan dan anggota BK yang ditemuinya, Dahlan mengaku telah menjelaskan oknum anggota DPR yang diduga pernah meminta sesuatu di lingkungan BUMN. Namun ia tidak tahu apakah anggota dewan yang pernah meminta sesuatu itu hanya suruhan atau bukan. Upaya Dahlan melaporkan ke BK juga bukan semata membuka aib DPR, tapi bersih-bersih di kementeriannya. "Sebetulnya setelah dari BK ini pekerjaan saya yang terbesar adalah bersih-bersih 'rumah sendiri' karena

kita semua tahu BUMN dianggap sarangnya korupsi," kata Dahlan setelah bertemu BK, awal Oktober lalu.

Dahlan mengatakan, semangat dirinya untuk membersihkan atau mencegah BUMN dari upaya intervensi dan kongkalikong. "Jadi sebetulnya titik beratnya membenahi BUMN, bukan membenahi lembaga lain di luar BUMN, karena saya Menteri BUMN. Saya bukan lembaga atau aktivis yang tugasnya seperti itu. Saya tetap Menteri BUMN yang sebaiknya saya konsentrasi membenahi BUMN," lanjutnya.

Polemik soal pemerasan ini terus

bergulir dengan aneka bumbunya. Banyak juga yang mempertanyakan mengapa Dahlan tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa ditindaklanjuti. Sebagian mengatakan bahwa Dahlan sedang mencari "panggung" untuk melenggang sebagai presiden atau wakil presiden pada 2014.

Citra buruk parlemen dan BUMN bermuara pada sistem yang memungkinkan semua kalangan terlibat dalam praktik kotor ini. Menurut Ketua Umum Paguyuban Mantan Anggota DPR RI (Padmanagri) Moestahid Astari, sistem memberi andil terjadinya tindakan korupsi. "Mungkin karena sekarang

lebih terbuka ya. Tapi kalau ada anggota fraksi yang melanggar dulu kan bisa langsung di-recall," kata mantan Ketua Fraksi Karya Pembangunan (sekarang Fraksi Partai Golkar) ini.

Walhasil, bila kasus ini tidak tuntas dibereskan maka masyarakat akan sangat kecewa. Bila ada anggota DPR yang melanggar tidak diambil tindakan maka kepercayaan kepada lembaga legislatif makin luntur. Sebaliknya, bila ada pejabat yang menggunakan isu korupsi tanpa melaporkan ke KPK dan hanya untuk kepentingan citra dirinya, masyarakat pun akan segera menghukumnya. ◀

### BILA POLITIK JADI MATA PENCAHARIAN

**TUDINGAN** adanya pemerasan atau kongkalikong antara para politisi di Senayan dan sejumlah direksi di BUMN, mungkin juga dengan para pengusaha, sebenarnya memperlihatkan kondisi politik masa kini yang sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon, para politisi sudah tidak lagi menganggap politik sebagai alat perjuangan dan pengabdian. "Paradigma sudah berubah. Saat ini politik sebagai mata pencaharian," katanya saat dialog kenegaraan "Politisi Antara Lobi dan (Minta) Upe-ti" di DPD, Rabu (31/10). Akibatnya, partai politik menjadi korban.

Sikap Partai Gerindra sendiri jelas dalam kasus korupsi atau pemerasan, bila terbukti, maka akan dipecah. Sebab partai tidak mungkin memerintahkan anggotanya melakukan pemerasan untuk keuangan partai. Karena itu, Fadli mewanti-wanti kepada se-

genap anggota Fraksi Partai Gerindra, terutama yang duduk di Badan Anggaran, untuk tidak bermain-main dengan anggaran. Sebab hal itu sangat rawan terjadinya permainan antara anggota DPR dan pemerintah.

Selama ini, tidak ada seorang pun anggota Fraksi Partai Gerindra yang terlibat dalam permainan kotor di Badan Anggaran. Ini jadi komitmen partai untuk menjaga amanat masyarakat yang sudah memilihnya. Sikap anti korupsi merupakan sikap partai sejak awal didirikan.

Sedangkan dalam kasus dugaan anggota dewan yang memeras BUMN, Fadli meminta agar Dahlan bersikap terbuka dan menjelaskan siapa saja yang terlibat agar jelas bagi semuanya. "Dahlan Iskan tidak bisa berkelit lagi. Wajib sebutkan siapa yang minta jatah," katanya. ◀



FOTO MUSTAFA KEMAL

DI kalangan kader dan simpatisan Partai Gerindra, sosok Edhy Prabowo sudah demikian melekat. Ia termasuk orang lama dalam pengurusan partai, yang turut bersimbah keringat mendirikan Gerindra. Yang membuatnya lebih terkenal, tentu saja karena Edhy, begitu ia biasa disapa, kerap mengikuti ayun langkah sang Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, kemanapun berada. Bahkan, ia kerap menyertai Prabowo, meski kesibukannya selaku anggota Komisi VI DPR RI menyita banyak waktunya.

Edhy bukanlah sosok yang gemar ber-cuap-cuap di media. Ia memilih fokus pada tugas dan pekerjaan. Buktinya, tatkala sebagian anggota DPR berang dan menumpahkan kemarahannya di media terhadap "polah tingkah" Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, Edhy Prabowo tetap bergeming. Bagaimanakah dia melihat perseteruan DPR dengan Dahlan Iskan? Lalu, seperti apakah pandangan dan pendapatnya tentang BUMN? Berikut petikan wawancara **M. Budiono** dari tabloid *Gema Indonesia Raya* dengan Edhy Prabowo, yang berlangsung di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

#### **Bagaimana Bapak melihat pertikaian Menteri BUMN dengan anggota DPR RI?**

Partai Gerindra dan juga bagi Fraksi Partai Gerindra di DPR RI berpendapat, seharusnya BUMN bisa menjadi motor utama penggerak ekonomi negara. Jadi, BUMN benar-benar bisa menghidupkan roda ekonomi di semua sektor. Untuk itu, butuh seorang Menteri BUMN yang memiliki komitmen besar, menjalankan roda perekonomian kita.

Saat ini BUMN memiliki aset tak kurang dari Rp 2.700 triliun, atau lebih dari satu setengah nilai APBN. Artinya, dengan aset sebesar itu seharusnya BUMN dapat menghasilkan

pendapatan yang besar. Kenyataannya, sampai hari ini, pendapatan BUMN masih jauh dari harapan. Pendapatannya kurang dari 4% atau hanya sekitar Rp 124 triliun pertahun. Itu artinya, masih terlalu banyak yang belum dilakukan. Nah, harapan kami, dengan adanya Pak Dahlan akan banyak yang bisa dilakukan untuk membesarkan BUMN secara nasional.

#### **Kenyataannya seperti apa?**

Hingga hari ini, berdasarkan pandangan kami, Pak Dahlan belum optimal mengurus BUMN. Sudah begitu, tak sedikit persoalan yang menghampiri Kementerian BUMN sejak beliau datang. Salah satunya adalah kisruh Surat Edaran 236. Isinya mandat kepada Deputi dan Direksi BUMN, dan dengan surat itu Direksi bisa menjual aset BUMN dan melakukan keputusan di luar RUPS. Ini artinya menyalahi undang-undang.

Buat kami hanya untuk meluruskan bukan mencari kesalahan pribadi. Tujuan utamanya adalah bagaimana aset negara yang sangat besar, mencapai Rp 2.700 triliun itu, bisa memberi keuntungan yang besar, minimal lebih besar dari bunga bank. Misalnya, bisa mencapai 12% - 15%.

Tapi nyatanya, dari sisi teknik beliau tidak menguasai masalah itu. Beliau kurang serius mengurus BUMN. Kalaupun ada BUMN yang bagus, dasarnya memang BUMN itu sudah bagus. Tapi bagaimana membuat yang belum bagus menjadi bagus, belum ada buktinya. Alih-alih, berpikir membesarkan BUMN, eh malah bermain-main, bergaya dan berakrobat.

Komisi VI sebenarnya akan mengeluarkan surat melalui pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden. Isinya, pandangan komisi menyangkut kinerja Menteri BUMN. Namun, belum bulat - karena Fraksi Demokrat pada

awal paling keras mengusulkan akhirnya tidak setuju -- maka surat itu tidak diteruskan.

#### **Isinya usulan reshuffle?**

Bukan *reshuffle*, itu urusan presiden. Kami hanya menyampaikan laporan kinerja menyangkut menteri ini berdasarkan pandangan Komisi VI. Partai Gerindra simpel kok melihat ini. Lihat saja dari sisi negara, bekerja tidak dia. Kalau tidak, ya sudah copot. Yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri kan Presiden. Itulah poin-poin yang mau kami sampaikan. Dan, itu belum berlanjut sudah muncul isu-isu yang lain.

Yang jelas Partai Gerindra yakin, tidak ada masalah apapun, dan semua memakai koridor. Intinya kita tetap dukung bila tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau ada yang salah kita pasti akan kritik secara konstruktif. Tidak melakukan pembiaran, karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

#### **Apakah benar, BUMN menjadi sapi perah?**

Saya tidak tahu masalah itu, yang pasti Fraksi Partai Gerindra bersih dan tidak melakukan praktik seperti itu. Saya berharap, kalau memang ada indikasi, tendensi, dan sudah terbukti melakukan pemerasan, pemaksaan, meminta sesuatu, atau apalah namanya, ya laporkan saja. Kalau itu pidana ya ke ranah pidana. Bukan malah berpolemik di media.

Sebagai menteri, dia punya anak buah, para Direktur dan Direksi BUMN, laporkan tuduhan itu, tapi lengkapi dulu dengan data kongkret. Jangan orang telepon bikin janji segala macam itu dibilang pemerasan. Komunikasi kan tetap harus dibangun. Proses politik itu kan banyak, salah satunya komunikasi, tukar informasi, lobi, itukan semua proses.

#### **Artinya keterpurukan BUMN itu memang karena salah urus?**

Kesimpulan awal saya, sebagian besar BUMN kita salah urus, dan pemerintah kurang berpihak secara penuh kepada BUMN. Artinya begini, kalau jelas-jelas kita punya perusahaan transportasi, angkutan laut, kenapa untuk mengangkut batubara, menyuplai pembangkit listrik PLN harus menggunakan yang lain. Kalau kita bisa mencetak buku, uangnya untuk kepentingan BUMN juga, lalu kenapa harus mencetak di tempat lain.

Kita tidak mengecilkan dan mengesampingkan peran swasta, karena swasta harus dibesarkan. Tapi sebelum kita membesarkan BUMN lebih dulu dibesarkan. Masa sih dari sekian banyak pasar, satu-pun tidak ada.

#### **Kalau ada usulan menjual BUMN yang merugi, bagaimana pendapat Bapak?**

Kerugian itu harus dilihat dari banyak sisi. Kalau menyangkut publik, bisa saja untung sedikit karena itu pelayanan massal, asal tidak merugi. Perum, misalnya, dituntut untung dan memberikan pelayanan. Tidak perlu untung banyak tapi pelayanan baik. Sementara PT harus untung banyak di atas bunga bank. Seperti PTPN, batubara termasuk PLN. Itu kan bisnis monopoli mana mungkin rugi. Bahwa untuk pelayanan rakyat, listrik harus murah, itu kan ada subsidi.

Jadi, kalau rumah kita ada tikus, jangan rumahnya dibakar, yang benar tikusnya ditangkap. Kalau terpaksa harus menghilangkan satu kamar ya hilangkanlah, tapi sekali lagi bukan rumahnya. Karena perusahaan itu bukan mahluk hidup, perusahaan itu tergantung manusia yang mengelola. Jadi orangnya harus dibenahi, diperbaiki, makanya butuh pemimpin yang benar. ◀

## Prabowo Subianto Disambut Hangat di Tanah Laut

**KETUA** Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 31 Oktober 2012 hadir di lapangan Pulau Sari, Jalan A. Yani KM. 45, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, untuk bersilaturahmi dengan warga setempat, dan memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati Tanah Laut Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur. ◀

FOTO DOK. DPC GERINDRA KAB. TANAH LAUT



### PP GEMIRA

## Gebyar Muharam dan Tabligh Akbar

**PERINGATAN** Tahun baru Islam, 1 Muharram 1434 H, yang jatuh pada Kamis (15/11) tak luput dari perhatian Gemira (Gerakan Muslim Indonesia Raya). Bekerjasama dengan Kecamatan Pulo Gadung dan Dewan Masjid Indonesia, Gemira menyelenggarakan Gebyar Muharam dan Tabligh Akbar. Acara tersebut diselenggarakan di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur.

Acara yang dilaksanakan saban tahun ini dimulai pukul 07.00, diawali dengan pawai keliling. Ribuan warga masyarakat di sepanjang jalan yang dilewati arak-arakan tumpah ruah turun ke jalan. Anak kecil sampai orang dewasa, berbaur bersama mengapresiasi kegembiraan dalam menyambut Tahun Baru Hijriah sambil melantunkan Salawat Nabi. Jumlah tersebut menjadi makin banyak, terutama oleh mereka yang antusias menghadiri acara bazar beserta lomba-lomba bernafaskan Islami, dan Tabligh Akbar.

Acara itu juga melibatkan mubalig yang tergabung dalam Majelis Zikir Indonesia Raya (MAZIA). Secara bergantian, mereka mengisi ceramah dalam acara Tabligh Akbar tersebut. Diantaranya Habib Abdurrahman Al Habsyi, Ustadz Nurul Huda, KH. Mujib Mudhori, dan Buya Ridlo.

Dalam ceramahnya, Habib Mahdy Alatas, Ketua Umum Gemira menceritakan sejarah terjadinya Hijriah di zaman Rasulullah SAW. Menurut Habib Mahdy, perjalanan hijrah yang menandai penanggalan Islam patut teladani, terutama untuk melaksanakan Hijrah di masa kini dan masa datang. Yaitu, melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk umat dalam membangun Indonesia Raya. ◀ **MBO**

### DPD SUMATRA SELATAN

## Membagikan Susu dan Asuransi Gratis

**CALON** Wali Kota Palembang H. Nuriswanto terus melakukan aksi menarik simpati dalam rangka Pemilukada Kota Palembang. Pada Ahad (14/10) misalnya, Nuriswanto mengunjungi warga Lorong Unglen 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Kedatangan calon wali kota dari Partai Gerindra ini disambut meriah oleh warga. Tak hanya orang-orang tua, anak-anakpun turut menyambut kedatangan anggota DPR/MPR RI ini. Mereka memanfaatkan kunjungan calon pemimpinnya itu berfoto bersama di pintu masuk lorong.

Dalam kunjungan yang bertemakan Revolusi Putih itu, Nuriswanto membagikan paket susu gratis, selain asuransi gratis yang berlaku 3 tahun atau sampai 31 Desember 2014. Rencananya, asuransi ini akan dibagikan kepada 200 ribu warga Kota Palembang. Pada kesempatan itu, Nuriswanto juga menawarkan ambulans gratis untuk warga yang membutuhkan.

Kepada warga masyarakat, Nuriswanto menghimbau, untuk tidak salah dalam memilih calon wali kota. Ia berharap, masyarakat bisa menggunakan hak

pilih dengan benar. Yaitu, memilih calon yang tidak hanya memberikan janji tapi memberi bukti, seperti Nuriswanto.

Sehari sebelumnya atau Sabtu (13/10), Nuriswanto juga mengunjungi kalangan di Simpang Empat Pulokerto Kecamatan Gandus. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka sosialisasi dan perkenalan dirinya. Pada kesempatan itu, Nuriswanto mengajak masyarakat setempat untuk bersantap sarapan pagi. Wargapun menyambut ajakan dengan antusias. Seperti di Lorong Unglen, Nuriswanto juga membagikan asuransi gratis untuk semua warga setempat. Mulai dari pedagang hingga pengunjung Kalangan tersebut.

Tarmizi, tokoh masyarakat setempat menyatakan dukungannya kepada Nuriswanto. Ia berharap, Nuriswanto bisa memenangi pemilukada, dan sukses menjadi Wali Kota Palembang. "Jika terpilih menjadi Wali Kota Palembang, saya berharap beliau bisa menjadikan pasar kami ini menjadi pasar tradisional yang permanen, sehingga dapat beroperasi setiap hari," kata Tarmizi. ◀ **MBO**

## DPD GERINDRA KALTIM

## Ipong Muchlissoni Bikin Gebrakan

SETELAH sejak usai Pemilu 2009, DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur (KalTIM) telah beberapa kali berganti ketua, sampai kemudian DPP Partai Gerindra mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru yang isinya menetapkan: Ipong Muchlissoni menjadi Ketua DPD Partai Gerindra KalTIM. Pengukuhan Ipong, seorang politisi yang sebelumnya dikenal sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan loyalis Gus Dur ini berlangsung pada 29 Agustus 2012.

Ipong memang memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi di Samarinda, Ibu Kota KalTIM. Pada musim Pemilu pada 2010, sebuah lembaga survei dari Surabaya pernah mengukur tingkat pengenalan publik terhadap pria jangkung yang punya hobi menyanyi ini, yang hasilnya mencapai 98%. Itu bisa dimaklumi, karena Ipong pernah dua periode menjabat anggota DPRD KalTIM, dan seorang pengusaha yang sukses mengembangkan proyek perumahan di Samarinda.

Sebelum menerima tantangan dari Partai Gerindra untuk memimpin DPD Partai Gerindra KalTIM, Ipong sebenarnya berniat pensiun dari dunia politik, setelah PKB versi Gus Dur tak lagi diakui oleh pemerintah. Darah politiknya kembali menggeleagak setelah DPP Partai Gerindra menantang untuk memimpin partai berlambang Kepala Burung

Garuda ini di KalTIM, dan ia menerima tantangan itu. Dan, Partai Gerindra di KalTIM pun seakan mendapat darah segar.

Maka, begitu menerima SK, Ipong langsung membuat gebrakan. Pertama-tama, ia melakukan pendaftaran kepengurusan DPD Partai Gerindra di bawah kepemimpinannya ke KPU Provinsi KalTIM. Pada waktu bersamaan, ia juga menyiapkan kantor sekretariat baru yang cukup megah di kompleks perumahan Vila Tamara Samarinda. Hampir seluruh ruangan kantor baru itu berhiaskan atribut kebesaran Gerindra dan gambar Calon Presiden Prabowo Subianto.

Sepekan kemudian, Ipong dengan gencar melakukan konsolidasi ke cabang-cabang se-KalTIM. Tindak lanjutnya, pada 6 September 2012 siang, seluruh pimpinan DPC Gerindra se-KalTIM berkumpul di markas Gerindra KalTIM yang baru, dan mereka memberikan dukungan pada Ipong. Malam harinya, ia mengundang ribuan orang dari pengurus partai politik lain dan ormas setempat untuk hadir dalam forum halal bihalal. Intinya, forum itu digunakan oleh Ipong sebagai wahana untuk memperkenalkan diri kepada publik sebagai Ketua DPD Gerindra KalTIM.

Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani hadir pada acara malam itu. Saat berpidato, Muzani menaruh harapan besar kepada Ipong untuk segera memimpin pergerakan guna



FOTO DOK. DPD GERINDRA KALTIM

membangkitkan Gerindra yang sekian lama loyo. Lalu, sekitar sebulan setelah pidato itu, Muzani kembali datang ke Samarinda. Kali ini ia ditemani Ketua Umum DPP Gerindra Profesor Suhardi dan pengurus DPP Gerindra lainnya, Jamal Mirdad. Para petinggi partai ini hadir dalam hajatan DPD Gerindra KalTIM berupa Jalan Sehat Bersama Prabowo, yang berlangsung 4 November silam.

Meski Prabowo tidak hadir dalam acara jalan sehat itu, namun sambutan masyarakat luar biasa. Puluhan ribu manusia, tumpah-ruah menyesaki lapangan dan jalan raya di dekat Jembatan Mahakam. Berbagai media, baik cetak maupun televisi lokal, menggambarkan suasana kerumunan massa sejak pukul 06.00 hari itu dengan istilah: "Tepian Mahakam menjadi lautan manusia."

"Ini awal kebangkitan Gerindra di KalTIM," begitu komentar Muzani.

Nah, Ipong pada perhelatan itu tampil sebagai seorang bintang. Setelah menembangkan satu nomor lagu rock berjudul "Semut Hitam" karya God Bless, Ipong berorasi dengan nada kocak dan menggebrak. "Untuk mewujudkan haluan baru menuju kemakmuran di Indonesia, tidak ada cara lain, selain menjadikan Prabowo sebagai Presiden. Nah, agar itu tercapai, Gerindra harus menang!" ujar Ipong dengan penuh semangat.

Acara jalan sehat hari itu menyediakan berbagai hadiah menarik, yaitu: tiket umroh, sepeda motor, puluhan *blackberry* dan ribuan voucher pulsa telepon seluler. Profesor Suhardi mencabut undian untuk hadiah umroh, disusul Muzani untuk undian motor. ◀ MBO



PP GEMA SADHANA

## Peringatan Satu Tahun Gema Sadhana

PERINGATAN satu tahun Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (Gema Sadhana) yang jatuh pada Selasa (13/11) terasa sangat spesial. Penyebabnya, peringatan ini bersamaan waktunya dengan jatuhnya Hari Raya Deepavali 5114 Kaliyuga. Yaitu, hari besar Umat Hindu Keturunan India.

Peringatan setahun Gema Sadhana --sayap Partai Gerindra yang memayungi umat Hindu, Budhha, serta Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa -- ini dilaksanakan secara sederhana dan kekeluargaan di rumah A.S. Kobalen, Ketua Umum Gema Sadhana. Acara dibuka dengan pematongan tumpeng oleh Hashim S. Djojohadikusumo, selaku Ketua Dewan Pembina Gema Sadhana.

Dalam sambutannya, Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyatakan, gembira menyaksikan pluralisme yang ada di dalam Gema Sadhana. Terlebih karena Hashim melihat kehadiran para pengurus mengenakan pakaian kebesaran adat

masing-masing.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain perwakilan DPD Gema Sadhana, seperti Budi, SE (Ketua DPD Sumut), I Made Suarjaya, SH (Ketua DPD Lampung), dan Yudhistira (Ketua DPD DKI Jakarta). Selain itu, terlihat hadir pula beberapa elite Partai Gerindra, antara lain Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar, Marsda TNI (Purn) Mutanto Yuwono, Rani D. Soetrisno, Maryani Djojohadikusumo dan Annie Djojohadikusumo bersama temannya.

Sementara A.S. Kobalen, Ketua Umum Gema Sadhana mengatakan, satu tahun berkinjanya Gema Sadhana ini telah memberi kita banyak pelajaran untuk lebih berempati terhadap sesama. Seperti apa yang terjadi di Lampung Selatan. Gema Sadhana, kata Kobalen, banyak belajar dan berterimakasih kepada semua pejuang dharma di 23 provinsi di seluruh Indonesia, yang bahu membahu membela kepentingan sesama. ◀ MBO

## DPC. GERINDRA LEBAK

## Lolos Tahapan Verifikasi



FOTO DOK. DPC GERINDRA KAB LEBAK

USAHA dan perjuangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Lebak Banten menjalani verifikasi faktual oleh KPUD Lebak berbuah manis. Tekanan dan kelelahan yang dirasa selama sebulan menjalani proses verifikasi terobati, setelah DPC Gerindra Kabupaten Lebak dinyatakan lolos verifikasi. Pernyataan lolos verifikasi itu disampaikan KPUD Lebak dalam suatu acara di Wisma Bhangkit, Rangkasbitung, Senin (26/11).

Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan DPC Kabupaten Lebak, tapi Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR) beserta anggota dan simpatisan Partai Gerindra se Kabupaten Lebak-Banten merasakan hal yang sama. Gerindra Lebak adalah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Banten yang berhak menjadi peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Presiden 2014.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Bambang Fajar Suseno, menyatakan, cukup puas dengan hasil yang diperoleh partai Gerindra selama berlangsungnya tahapan verifikasi. Menurut Bambang Fajar, keberhasilan ini adalah keberhasilan seluruh anggota dan simpatisan Partai Gerindra.

Keberhasilan partai Gerindra Kabupaten

Lebak menjadi peserta pemilu mendatang, kata Bambang, menandakan seluruh pengurus, mulai dari DPC, PAC hingga PR dan segenap anggota benar-benar menjalankan instruksi dengan penuh tanggungjawab. Dan, ini sesuai amanat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Ini satu bukti kerja keras yang ikhlas dan perjuangan seluruh pengurus yang tidak mengenal lelah", kata Bambang lagi.

Sebelum pengumuman keberhasilan Partai Gerindra Lebak lolos verifikasi faktual ini, KPU telah Gerindra sebagai salah satu partai terbaik secara administrasi dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Untuk itu, ia bersama seluruh jajaran pengurus DPC, PAC dan PR menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas partisipasi dan peran aktif seluruh anggota. Terutama mereka yang selama ini membantu proses verifikasi faktual.

Di Kabupaten Lebak, 14 dari lima belas parpol yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat hasil verifikasi faktual KPU Lebak adalah: Partai Nasdem, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPN, PDI Perjuangan, PKBIB, PPP, Partai Golkar, PAN, PKB, PPRN dan PDP. ◀ MBO



FOTO-FOTO MUSTAFA KEMAL

## Pesawat Made In PASAR REBO

Berawal dari industri rumahan, CV. Citra Persada Pratama (Anglo-Indonesia) kini bisa mengeksport produknya ke Eropa dan Timur Tengah.

OLEH AGUSTAMAN

**BAU** resin, katalis dan bahan-bahan kimia lain terasa begitu menyengat kala memasuki bengkel kerja pembuatan replika pesawat milik CV. Citra Persada Pratama di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Beberapa pekerja, nampak serius mengerjakan tugasnya masing-masing. Ada pula yang memasukkan adonan semacam cairan ke dalam cetakan-cetakan yang sudah disiapkan. Pekerja lainnya menghaluskan badan dan sayap pesawat dengan ampelas, kikir dan gerinda. Sementara di ruangan lain sejumlah pekerja melakukan pengecatan, membuat logo pesawat, melengkapi aksesoris. Dan, ada juga yang melakukan pengecekan dan memasukkan replika pesawat ke dalam wadah yang sudah disediakan. Pendek kata, semuanya terlihat sibuk. Maklum, sebelum tahun 2012 berganti, beberapa pesanan harus sudah dikirim ke pemesannya, di Timur Tengah dan Eropa.

"Ya, pesanan ini harus selesai sebelum Desember, sebelum musim liburan akhir tahun dan Natal di Eropa. Pemesannya Aviation Mega Store (AMS) di Belanda. Maskapai penerbangan Etihad Airways juga meminta kami segera kirim ke Abu Dhabi," papar Nurhayati, manajer pemasaran CV. Citra Persada. Menurut Nurhayati, setiap bulan ratusan replika pesawat "terbang" ke beberapa negara Eropa, Timur Tengah dan beberapa pesanan dari maskapai penerbangan dalam negeri. "Untuk Eropa, saat ini pesanan lebih banyak dikirim ke AMS, jaringan toko terbesar di Belanda. Dulu paling banyak ke Inggris, karena

kebetulan partner pemasaran kami, yaitu pak Tony Jeanings yang punya toko souvenir dan hobbies model pesawat di Inggris. Sedangkan Timur Tengah, Etihad Airways punya Uni Emirat Arab yang banyak memesan replika pesawat dari kami," jelas Nurhayati lagi.

CV. Citra Persada Pratama awalnya didirikan oleh empat sekawan: Marison-Agus-Onar dan Aris pada tahun 1996. Menurut penuturan Nurhayati, keempat sekawan itu dulunya adalah karyawan di perusahaan yang membuat model pesawat di Jakarta. Tahun 1995 mereka keluar. Setahun kemudian mereka patungan modal sebesar Rp 4 juta dan membuat usaha serupa di rumah, yakni si kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Dari keempatnya, hanya Marison yang bertahan melanjutkan usaha ini.

"Waktu itu karyawannya hanya tujuh. Empat orang pendiri ditambah saya dan dua orang lagi. Dengan merek *Son Models*, kami memasarkan *door to door* ke beberapa maskapai penerbangan. Awalnya memang susah mendapat order. Tapi lama-lama banyak perusahaan tertarik dengan produksi kami. Bahkan pada 2001 silam, satu maskapai yang sekarang sudah tidak ada, pesan sampai 100 unit," papar Nurhayati yang bergabung di Citra Persada sejak 2000.

Titik balik perusahaan terjadi pada 2002 setelah produksinya dimuat di majalah *Angkasa*. "Waktu itu pak Tony Jeanings yang sempat membaca artikel tentang kami rupanya tertarik, dan dia melihat ada peluang besar di usaha ini. Namun,



Bengkel Kerja Anglo-Indonesia

menurut Nurhayati, ruang lingkup pemasaran kami masih kecil. Begitu juga soal kualitas produksi, masih perlu ditingkatkan," cerita Nurhayati.

Tony Jeanings adalah ekspatriat asal Inggris yang sudah lama tinggal di Indonesia. Di Jakarta Tony tercatat sebagai profesional di bidang perbankan. Sebelumnya, Tony sempat bekerja di perusahaan pembuatan pesawat. Dia juga senang mengoleksi miniatur pesawat.

Tanpa membuang waktu, Tony lalu menghubungi Citra Persada dan mengajukan proposal untuk bergabung di usaha yang dibangun Marison dkk. ini. Singkat cerita, Oktober 2005, Tony akhirnya bergabung dengan usaha rumahan ini. "Lewat rekomendasi dia, kami pun bisa mengajukan kredit ke BRI sebesar Rp 250 juta. *Workshop* dan kantor pun pindah ke tempat yang lebih luas di kaveling perumahan Pesona Kalisari. Produksinya kemudian diberi nama Anglo-Indonesia," sambung Nurhayati sembari mengatakan, kini bukan hanya BRI yang memberi kredit, tapi juga Bank Mandiri.

Tony kemudian melakukan pembenahan, khususnya soal produk. Karena memiliki pengalaman

pembuatan pesawat, bukan hal sulit buat Tony memperbaiki produksi tersebut. Ketika itu, meski sudah memakai *fiberglass* sebagai bahan utama pembuatan replika pesawat, tapi produk Marison dkk. masih sedikit terlihat kasar. Bahkan, stiker pada gambar pesawat tampak seperti tempelan, sehingga memberikan kesan murah.

Untuk memberikan kesan mewah, gambar pada pesawat diganti dengan jenis stiker air yang bahannya masih diimpor dari luar negeri. Dengan begitu, gambarnya terkesan menyatu dengan *body* pesawat. Namun, yang tidak berubah adalah pengerjaannya masih dilakukan dengan tangan (*handmade*). Prosesnya memang sedikit memakan waktu, tapi hasilnya tak kalah bagus dengan model *die cast metal* yang buatan pabrik.

"Karena yang dibuat adalah miniatur pesawat, proses pengerjaannya harus benar-benar serupa dengan aslinya. Skalanya mulai dari 1:18, 1:36, sampai 1:200. Kami biasanya mendapat gambar asli model pesawat yang akan dibuat dalam bentuk tiga dimensi dari foto atau internet. Selain *fiberglass*, kami juga memakai kuningan dan kaca plastik untuk membuat mesin dan aksesoris pesawat," jelas Morison sambil mengawasi anak buahnya.

### Berani bersaing

Dengan karyawan sebanyak 20 orang (produksi dan administrasi), Anglo-Indonesia bisa memproduksi 300 unit miniatur pesawat (model solid) dan 40-50 unit jenis helikopter per bulan. Model helikopter yang dibuat mulai dari jenis R44, Daulphin, MD 500, Bell, Gazelle, NBO sampai MI 8. Sedangkan produksi pesawat (solid model) antara lain Learjet 45, Falcon, Cessna, Glufstream, Boeing dan Airbus. Di luar itu, Anglo-Indonesia juga memproduksi aneka gantungan kunci berbentuk pesawat terbang.

Di luar pesanan partai besar dari AMS Belanda dan Etihad, produk replika pesawat ini juga melayani pesanan dari berbagai maskapai penerbangan komersial, seperti *Thai Airways*, beberapa maskapai penerbangan dan kargo, seperti *Lufthansa*, *JAL*, *Gulf Air*, *IAT* dan *DHL*. Juga pesanan dari *Pelita*, *Walesi*, *Airfast*, *White Sky*, *Deraya*, *Trigana*, sekolah penerbangan *BIFA* dan *Alfa Flying School*. Beberapa kolektor dan hobbies juga menjadi pelanggan Anglo-Indonesia.

Sayangnya, papar Nurhayati, maskapai penerbangan terbesar da-

lam negeri, *Garuda*, enggan memesan produk anak bangsa ini. "Kami pernah menawarkan ke mereka. Tapi mereka lebih memilih produksi buatan Cina. Padahal pemesan dari luar justru mengakui buatan kami lebih unggul dan bagus ketimbang buatan Cina," terang Nurhayati.

Harga yang dipatok bervariasi, mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 10 juta. Sedangkan ukurannya, mulai dari 1:250 sampai 1:4.

Meski mengaku pesaingnya lebih dari satu, Nurhayati optimistis produk buatan Anglo-Indonesia bisa bersaing di pasar. "Permintaan dari dalam dan luar negeri sebetulnya terus meningkat, tapi karena terbentur masalah SDM, kami belum bisa memenuhi order yang datang. Akhirnya banyak pesanan yang ditolak," sambung Nurhayati seraya menjelaskan omsetnya rata-rata Rp 125 juta per bulan.

Ke depan, selain terus memperbaiki kualitas produk, Anglo-Indonesia juga lebih memfokuskan pasar luar negeri. Alasannya, selain pembayarannya lebih cepat, juga sebagai sumber pemasukan devisa. "Kami ingin produksi anak negeri ini menjadi kebanggaan nasional dan dikenal di pasar mancanegara," ujarnya yakin. ◀



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA



*Mengucapkan  
Selamat*

*Natal*

25 Desember 2012

dan

*Tahun Baru*

1 Januari 2013



*Selamat*

*& Natal* 25 Desember 2012

*Tahun Baru* 1 Januari 2013



BADAN KOMUNIKASI  
PARTAI GERINDRA

G E M A  
INDONESIA RAYA

# Undang-undang Koperasi untuk Kebangkitan Ekonomi



FOTO MUSTAFA KEMAL

**PEMERINTAH** dan DPR akhirnya menyetujui RUU Koperasi menjadi undang-undang, yang disahkan dalam rapat paripurna akhir Oktober lalu. Undang-undang Koperasi ini merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dianggap sudah tidak lagi sesuai perkembangan zaman.

Bagi Fraksi Partai Gerindra, undang-undang ini harus menjadi momentum kebangkitan perekonomian nasional. Sebab, melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sesuai amanat konstitusi dan merupakan koreksi terhadap sistem liberal yang sekarang menguasai perekonomian Indonesia.

"Menurut pandangan kami, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa akan dapat dicapai dengan menegakkan kembali nilai-

nilai sosial yang dijunjung oleh koperasi, yaitu kebersamaan, demokrasi/kesamaan hak, kesejahteraan bersama serta keadilan sosial," kata anggota Komisi VI Edhy Prabowo saat membacakan pandangan fraksi, yang menyetujui pengesahan RUU Koperasi jadi undang-undang.

Semangat Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan RUU Koperasi berpijak pada konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Semangat dan jiwa koperasi, selain mengutamakan asas kekeluargaan juga mengutamakan pencapaian kesejahteraan anggotanya. "Dengan adanya perubahan undang-undang Koperasi, maka koperasi diharapkan bisa lebih berperan dalam ikut menggerakkan dan

memajukan perekonomian nasional," lanjut Edhy.

Fraksi Partai Gerindra berpandangan, koperasi harus memainkan peran di bidang ekonomi strategis, seperti sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Keterlibatan koperasi dalam penanganan sektor-sektor strategis merupakan wujud konkret upaya pemerintah dalam menguatkan peran serta koperasi untuk memajukan perekonomian nasional, menuju masyarakat adil, makmur, serta merata. Sehingga perekonomian kita tidak dikuasai oleh perorangan atau sektor swasta tertentu, tetapi benar-benar mengikutsertakan peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam wadah yang bernama koperasi.

◀ IF

## APBN Rawan Diselewengkan

**MESKI** APBN 2013 sudah disahkan dalam rapat paripurna, akhir Oktober lalu, namun Fraksi Partai Gerindra tetap memberikan catatan kritis. Catatan ini dianggap penting, agar pembahasan RAPBN benar-benar mempertimbangkan anggaran bagi kepentingan rakyat, seperti infrastruktur. Bila tetap dibiarkan, Fraksi Partai Gerindra khawatir APBN 2013 yang sudah disahkan itu rawan diselewengkan. Hal ini terlihat dari banyaknya alokasi anggaran di kementerian atau lembaga yang naik secara signifikan.

Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis saat diskusi 'Mengembalikan Kebijakan APBN Kepada Amanat Konstitusional 1945' yang digelar Fraksi Partai Gerindra, akhir Oktober lalu.

"Terjadinya penyelewengan mengingatkan hampir rata-rata eksekutif yang berada di pemerintahan adalah orang partai politik dan memiliki tanggung jawab kelangsungan kepentingan partai politik," kata Fary. Anggota Komisi V ini mengambil contoh kasus dana bantuan sosial sebesar Rp 300 triliun, ternyata telah diselewengkan untuk kepentingan Pilkada.



FOTO ISTIMEWA

Kemudian, APBN juga masih terlalu gemuk untuk kepentingan birokrasi. Dari sekitar Rp 1.154 triliun total belanja pemerintah pusat, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. "Kenaikan ini akibat rencana pemerintah untuk membayar dana pensiun PNS sebesar Rp 74,2 triliun, menaikkan gaji sebesar 7% tahun 2013, dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI/Polri, dan pensiunan," kata Fary.

Di acara yang sama, pengajar Universi-

tas Brawijaya Malang Ahmad Erani Yustika mengatakan, APBN selalu didesain defisit dan tidak dimengerti sebagai instrumen ideologis untuk mencapai cita-cita konstitusi. "Sehingga tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi pembangunan nasional, amanah undang-undang tidak semuanya dijalankan, dan penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik pajak maupun PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," katanya. ◀ IF

## Dulu, Malaysia Takut Pada Indonesia

**MAKIN** banyak saja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami nasib buruk di negeri Jiran, Malaysia. Beberapa di antaranya mengalami penyiksaan, tak dibayar upah, dan ada pula yang dihukum mati. Padahal, seharusnya posisi Indonesia berada di atas Malaysia, karena Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan Malaysia.

Bahkan yang paling merendahkan adalah iklan "TKI on Sale" yakni iklan jual beli para TKI di Malaysia yang dianggap sangat merendahkan harga diri bangsa. Meskipun kemudian pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, sudah melayangkan protes keras.

Tidak heran bila anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Harun Al-Rasyid gusar dengan sikap arogan Malaysia. Negeri jiran itu terlihat angkuh dan tidak bersahabat. "Posisi kita seolah di bawah Malaysia. Padahal dulu Malaysia itu takut kepada Indonesia," kata Harun saat rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di kompleks Parlemen.

Harun menuturkan, pada tahun 70-an Malaysia sangat kekurangan sumber daya manusia. "Saat itu, Pemerintah Malaysia sampai ngemis-ngemis minta bantuan dari kita. Dan kita memberikan bantuan, termasuk kirim mahasiswa ke Malaysia," kata politisi Gerindra itu.

Kini, hampir semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai pengusaha Malaysia, bank-bank swasta pun sahamnya banyak dikuasai mereka, juga 2.000 TKI ada di Malaysia. "Seharusnya mereka takut dengan kondisi ini bila sewaktu-waktu Indonesia membuat perhitungan," ujar Harun.

Tapi kenyataannya, sambung Harun, hubungan Indonesia-Malaysia panas dingin. "Kini 300 WNI divonis hukuman mati dan dua di antaranya tinggal menunggu eksekusi," katanya dengan nada prihatin.

Sementara, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, TKI bermasalah yang ada di luar negeri tersebar mulai dari Malaysia, Taiwan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Trinidad. Di Malaysia, ada 1.135.285 TKI yang tersebar di sektor domestik dan perkebunan. Menurut Muhaimin, kondisi TKI di Malaysia ada kemajuan setelah dicabutnya moratorium pada 2011.

Pencabutan moratorium, jelas Muhaimin, karena ada perjanjian kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. "Dulu paspor dipegang majikan, sekarang TKI. Upah harus bayar lewat transfer, dalam seminggu ada libur sehari. Jadi TKI di Malaysia ada kemajuan," kata Muhaimin.

Sementara, di Uni Emirat Arab ada 1 juta TKI. Arab Saudi 1,1 juta orang, dan hingga saat ini sedang berlaku moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. "Kita sedang godok MoU baru dengan Arab dan mengajukan syarat standar minimum yang benar-benar ketat," jelasnya. Sedangkan di Taiwan ada 186.458 dan di Trinidad 163 orang yang semuanya pelaut.

Muhaimin mengaku sudah melakukan dua langkah agar ada perbaikan nasib TKI. *Pertama*, sosialisasi agar TKI yang akan berangkat harus benar-benar siap mental, *skill*, dan pendidikan. *Kedua*, meningkatkan diplomasi. "Kita mendorong agar Malaysia jangan mempekerjakan TKI di luar prosedur," katanya. ◀



FOTO ISTIMEWA

*Tantri Kotak*

## Ingat Sumpah Pemuda

**MASIH** banyakkah anak muda yang hafal ikrar Sumpah Pemuda? Vokalis band “Kotak” **Tantri** ternyata masih hafal dan masih ingat pula tanggal ikrar itu diucapkan, yaitu 28 Oktober. Menurut pemilik nama lengkap Tantri Syalindri Ichlasari itu, sumpah pemuda harus menjadi pengingat buat generasi muda untuk selalu bertindak positif. “Generasi muda dari tingkat modernisasi jadi lebih mudah. Kita mengisi jiwa-jiwa muda dengan hal-hal positif. Misalnya kita musisi buat lagu soal perdamaian,” katanya sambil memberi contoh bahwa lagu juga bisa memberi semangat terhadap anak muda.

Meski demikian, Tantri memiliki sumpah anak muda yang harus menjadi inspirasi anak muda saat ini. “Selalu berpegang teguh pada keyakinan, pasti beres. Kalau lagi nyetir sumpah nggak boleh sumpah serapah lagi,” ujar kata perempuan kelahiran Tangerang, 9 Agustus 1989, ini. ◀ IF



FOTO ALFIAN KARTIM/DOK. GIR

*Karlina Soepriyatno*

## Pengalaman Menarik

**MENJADI** pengurus partai yang membidangi masalah anak, tentu banyak pengalaman unik yang didapat. **Karlina Soepriyatno**, dokter yang juga Ketua Bidang Anak DPP Partai Gerindra, mengakui hal itu. “Banyak pengalaman menarik, tapi secara umum menggambarkan antusias masyarakat pada program-program kesehatan dan harapan-harapan mereka,” kata Pengurus Perempuan Indonesia Raya (PIRA) itu.

Misalnya, soal pemberian makanan pendamping ASI kepada balita kurang gizi di Jakarta dan Jawa Timur serta menggalakkan revolusi putih. Program ini banyak digemari masyarakat. Tapi sayang, pasokan makanan pendamping tidak selalu tersedia setiap saat. Apalagi dengan luasnya wilayah yang harus ditangani. Belum lagi soal sumber daya manusia yang tidak merata di sejumlah daerah. “Perlu strategi program yang merupakan hasil kolaborasi program Gerindra dan seluruh elemen, termasuk sayap partai,” kata direktur Rumah Sakit Grha Permata Ibu itu.

Meski cukup banyak hambatan dan tantangan, namun PIRA tidak berhenti melayani masyarakat. Seperti pemeriksaan dan pengobatan massal kepada keluarga kurang mampu, menggalakkan keluarga berencana, pembinaan produksi pengolahan makanan dan minuman, khitanan massal, pemberian kacamata bagi lansia, hingga bersih-bersih pantai. Dan kegiatan yang akan dilakukan pun sudah siap dilaksanakan, yaitu program pendampingan ASI eksklusif kepada ibu melahirkan, pembuatan klinik rawat jalan, pemberian makanan tambahan kepada balita dan pengobatan gratis bagi yang tidak mampu. ◀ IF



FOTO ANDI NUR HAMDI

*Yahya Taisir*

**Jangan Merasa Puas**

**PELUKIS** **Yahya Taisir** bangga sekaligus prihatin saat membuka pameran tunggalnya di Taman Ismail Marzuki (TIM), awal November lalu. Maklum, dukungan dari para tamu yang hadir, seperti murid dan sahabat, ikut meramaikan pameran bertajuk “2-3-4 in Harmony” itu.

Sedangkan keprihatinannya, karena salah seorang seniman yang juga gurunya yakni Agus Jolly sedang terbaring sakit. Kesempatan itu pun digunakan sebagai ajang pengumpulan dana. Yahya menyiapkan gentong donasi, sekaligus melelang lukisan berjudul “Legong” kepada hadirin. Lukisan tersebut kemudian dibeli oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, yang juga salah seorang kolektor karya-karya Yahya.

Bagi seniman Betawi ini, melukis memang bukan sekadar menggoreskan cat ke atas kanvas. Tapi proses bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. “Karena itu jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai,” katanya. Dengan anugerah berupa kemampuan melukis itulah Yahya selalu menyebut nama sahabat yang sudah membesarkan bakatnya. Mulai dari pelukis Hardi hingga Nyoman Gunarsa. “Pada akhirnya semua berpulang kepada Tuhan. Saya tinggal berjalan dan bekerja menghasilkan karya terbaik menambah khasanah seni dan budaya bangsa,” katanya. ◀ IF

## profil

menata sebgas mungkin pembangunan Kota Palembang,” ujarnya.

Nuriswanto mengaku agak kaget dengan pencalonan dirinya ini. “Saya lihat Partai Gerindra sudah berani sosialisasi ke media dan menyatakan kesiapan mendukung saya, membentuk koalisi. Saya sendiri ditugaskan Pak Prabowo membesarkan partai, dan ketika diperintahkan untuk maju ke Pemilu maka tentu saya akan melaksanakan tugas itu,” ungkap alumnus Fakultas Hukum Universitas Palembang ini.

Kota Palembang, menurut Nuriswanto, banyak yang harus dibenahi dan ke depan harus lebih baik lagi. “Pak Prabowo bilang kalau ada kader partai sendiri, calonkan dari partai sendiri. Kalau tidak ada, baru kita ambil dari luar. Tujuan politik adalah merebut kekuasaan secara konstitusional. Setelah

Nuriswanto mulai ditempa menjadi seorang kader partai politik sejak duduk sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PAC PDI) pada 1993. Saat terjadi perpecahan di tubuh PDI, Nuris, begitu pria ini biasa disapa, memilih bergabung dengan kubu Megawati yang membentuk PDI Perjuangan. Pada Pemilu 1999, Nuris pun terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel dari PDI Perjuangan. Namun, menjelang akhir masa jabatan, ia bersama 15 orang anggota dewan lainnya dipecat karena tidak sejalan dengan partai saat pemilihan Gubernur Sumsel.

Karier politiknya pun terus bergulir. Menjelang Pemilu 2004, Nuris digandeng KH Zainudin MZ untuk bergabung ke partainya, Partai Bintang Reformasi (PBR). Dan, dalam Pemilu Legislatif 2004, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Fraksi PBR. Namun lagi-lagi, ia harus berpikir ulang untuk terus bisa memperjuangkan aspirasi konstituenya. Mengingat, waktu itu, PBR telah ditinggalkan “Dai Sejuta Umat”, sehingga ia punya firasat partai yang menjadi kendaraan politiknya itu tak bakal lolos di Pemilu 2009. Seiring dengan itu, peraih gelar Master Management (MM) dari STIE

Nuriswanto

## “Tanpa Berpolitik Perjuangan Akan Percuma”

Berbekal pengalaman menjadi politikus sejak 1990-an dan menjadi anggota dewan untuk tiga partai yang berbeda, Nuriswanto kini siap berjuang di Partai Gerindra.

OLEH AGUSTAMAN

Budi Iswara, Surabaya, ini diminta temannya untuk mengembangkan Partai Gerindra. Tak tanggung-tanggung, ia didaulat oleh Prabowo Subianto menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel.

Dengan ikhlas dan kerja keras dia menerima amanat tersebut. Terbukti, kurang dari setahun menegakkan partai berlambang kepala burung Garuda di Sumsel membawa hasil yang menggembirakan. Lewat pemilu 2009, dibawah kepemimpinannya, Partai Gerindra berhasil mengantarkan dua orang anggota DPR RI, 6 orang anggota DPRD Provinsi, dan 49 orang anggota DPRD kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota di Sumsel. Nuris yang mewakili Dapil II Sumsel mengantongi 41.447 suara dalam pemilu tersebut.

Kini, pria yang pada tahun 1980-an pernah bekerja sebagai Marketing Asuransi Jiwa Panin Putra dan Manajer Pemasaran Sari Ayu Wilayah Sumbagsel ini fokus membesarkan Partai Gerindra, khususnya di Sumsel. “Kami cuma bertekad menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. Kami justru menginginkan partai ini bisa menjadi pemenang pemilu. Jadi, saya tidak menargetkan berapa besarnya, tapi harus lebih baik dari saat ini. Artinya, kalau sekarang ada enam kursi di DPRD Sumsel maka setidaknya menjadi 15 kursi pada pemilu mendatang,” harap Nuriswanto.

Nuriswanto optimis Gerindra menjadi lebih baik pada pemilu mendatang. Indikatornya, tambah dia, bisa dilihat kalau dulu pembentukan kepengurusan tergesa-gesa dan tanpa uang, sekarang Gerindra memiliki banyak anggota dewan. “Dahulu tanpa anggota dewan dan sangat sulit, sedangkan dengan kondisi sekarang banyak anggota dewan tentunya lebih gampang dalam meningkatkan perolehan suara,” tandas Nuriswanto. ◀

berkuasa baru kita membuat kebijakan pro rakyat,” tandas pria yang tercatat sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Bagi ayah empat anak ini, apa yang telah didapatkan sebagai anggota adalah amanat yang telah diberikan oleh rakyat, dengan demikian kepentingan rakyat harus diperjuangkan habis-habisan. Untuk itu, ia sangat memegang teguh motto yang menjadi landasan perjuangan dan kerjanya, yaitu: **“Rakyat tak butuh janji, tapi rakyat butuh bukti.”**

### Bukan Slogan Semata

Suami dari Hj. Riwi, S.Pd., ini menegaskan, apa yang menjadi motto perjuangan hidupnya bukanlah sekedar slogan atau janji semata. Namun, lebih memperlihatkan sebuah semangat dan optimisme hidup dalam menghadapi kondisi bangsa yang selalu berubah. Setidaknya hal tersebut bisa dilihat dari riwayat panjangnya sebagai politisi.

FOTO ANDI NUR HAMDI

**KESIBUKAN** politisi yang satu ini memang luar biasa. Bila tidak ada kesibukan di Jakarta, anggota DPR dari Partai Gerindra ini pasti mengunjungi daerah pemilihan (dapil) nya di Palembang, Sumatera Selatan. Belakangan ini, frekuensi kunjungannya ke Kota Empek-Empek itu makin meningkat, karena dia tercatat sebagai salah seorang bakal calon Wali Kota Palembang yang bakal bertarung di Pemilu Kota Palembang 2013.

Haji Nuriswanto, SH, MM., nama politisi kelahiran Lahat, 7 November 1961, ini menjadi satu-satunya nama yang diajukan oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan untuk maju sebagai calon untuk menduduki kursi “Palembang Satu”. Penunjukan Nuriswanto juga sudah mendapat lampu hijau dari Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Sebenarnya, saya bolak balik Jakarta-Palembang bukan belakangan ini saja, tapi sudah sering. Jadwalnya, Senin sampai Jumat bertugas sebagai anggota legislatif di Jakarta.

Sabtu-Minggu saya *ngantor* di Palembang. Semua itu dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada di dapil,” papar Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan yang juga anggota Komisi V DPR RI ini kepada *Gema Indonesia Raya*.

Penunjukan Nuriswanto sebagai bakal calon Wali Kota Palembang, menurut Budiarto Marsul – salah seorang pengurus DPD Partai Gerindra Sumsel -- karena Kota Palembang membutuhkan pemimpin yang visioner, reformis, tegas dan merakyat, semua itu ada pada diri Nuriswanto. “Kami pikir beliau figur yang tepat,” tutur Budiarto. Alasannya, Nuriswanto pernah berpengalaman duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel selama dua periode, dan sekarang menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI Pusat membidangi perhubungan, komunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal. “Jadi kalau sudah 10 tahun berkecimpung di bidang pembangunan, berarti kalau menjadi wali kota akan